

**PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PEMERINTAH
DESA TERHADAP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA
TERATAI KECAMATAN MARISA
KABUPATEN POHUWATO**

Oleh

GUSTIRANDA BANGGA

NIM : S2118115

SKRIPSI



**PROGRAM SARJANA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2022**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PEMERINTAH DESA TERHADAP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA TERATAI KECAMATAN MARISA KABUPATEN POHUWATO

Oleh

GUSTIRANDA BANGGA

NIM : S2118115

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar kesarjanaan
Gorontalo.....2022

PEMBIMBING I

Dr. Arman, S.Sos., M.Si
NIDN : 0913.0786.02

PEMBIMBING II

Dr. Gretty Syatriani Saleh, S.IP., M.Si
NIDN : 0922116102

Mengetahui

Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Darmawaty Abdul Razak, S.IP., M.AP
NIDN : 0924.0767.01

HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI
PENGARUH AKUNTABILITAS DAN
TRANSPARANSI PEMERINTAH DESA TERHADAP
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA
TERATAI KECAMATAN MARISA
KABUPATEN POHUWATO

Oleh

GUSTIRANDA BANGGA

NIM : S2118115

Skripsi Ini Telah dipertahankan Di Hadapan Komis Penguji

Tanggal.....2022

KOMISI PENGUJI

1. Dr. Arman, S.Sos., M.Si
2. Dr. Gretty Syatriani Saleh, S.IP., M.Si
3. Dr. Rusni Djafar, M.PA
4. Iskandar Ibrahim, S.IP., M.Si
5. Hasman Umuri, S.IP., M.Si

.....

.....

.....

.....

.....

MENGETAHUI,

Dekan Ilmu Sosial
Dan Ilmu Politik
Universitas Ichsan Gorontalo


DR. ARMAN, S.Sos., M.Si
NIDN : 0913.0786.02

Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan


Darmawati Abdul Razak, S.IP., M.AP
NIDN : 0924.0767.01

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya Tulis saya (Skripsi) ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya Tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah ini dengan disebutkan nama dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena Karya Tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Gorontalo,2022

Yang membuat Pernyataan



GUSTIRANDA BANGGA
NIM : S2118115

ABSTRACT

Gustiranda Bangga : S2118115 2022. The Effect of Village Government Accountability and Transparency on the Management of Village Fund Allocations in Teratai Village, Marisa District, Pohuwato Regency.

The problem in this study is how much influence the Simultaneous Transparency and Accountability of the Village Government (X) has on the Management of Village Fund Allocation (Y) in Teratai Village, Marisa District, Pohuwato Regency, and how much influence Transparency (X1) and Accountability (X2) of the Village Government have overall. Partial to Village Fund Allocation Management (Y) in Teratai Village, Marisa District, Pohuwato Regency?. The method in this study uses a descriptive quantitative approach that describes the influence of Transparency and Accountability (X) on ADD Management (Y). While the type of research used is Survey Research.

The results showed that there was a positive and significant effect of partial transparency (X1) on the Management of Village Fund Allocation in Teratai Village, Marisa District. This is shown by the Transparency variable which has a regression coefficient value of 0.216, and a probability value of 0.080 which means that Transparency affects the Management of Village Fund Allocation significantly by 21.6%. There is a positive and significant effect of the Accountability variable (X2) partially on the Management of Village Fund Allocation in Teratai Village, Marisa District. This is indicated by the Accountability variable which has a regression coefficient value of 0.277, and a probability value of 0.011, which means that Accountability affects the Management of Village Fund Allocation significantly, which is 27.7%. There is a positive and significant influence in the form of Transparency and Accountability variables on the management of Village Fund Allocation in Teratai Village, Marisa District simultaneously (together), which is proven that the constant value of 12,419 states that if the Transparency and Accountability variables are considered constant, then the management of Fund Allocation The village is 12,419. Meanwhile, if the regression coefficient value of each independent variable is increased by one unit, then the management of Village Fund Allocation will increase by the coefficient value of the independent variables.

Keywords: Accountability and Transparency, ADD

ABSTRAK

Gustiranda Bangga : S2118115 2022. Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Teratai Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Seberapa besar pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa (X) secara *Simultan* terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y) di Desa Teratai Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, serta Seberapa besar pengaruh Transparansi (X1) dan Akuntabilitas (X2) Pemerintah Desa secara *Parsial* terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y) di Desa Teratai Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato?. Metode dalam penelitian ini menggunakan deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yang menggambarkan adanya pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas (X) terhadap Pengelolaan ADD (Y). Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Survei.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Terdapat pengaruh positif dan signifikan Transparansi (X1) secara parsial terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Teratai Kecamatan Marisa. Hal ini ditunjukkan oleh variabel Transparansi yang memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,216, dan nilai probailitas sebesar 0,080 yang berarti Transparansi mempengaruhi Pengelolaan Alokasi Dana Desa secara signifikan sebesar 21.6%. Terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel Akuntabilitas (X2) secara parsial terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Teratai Kecamatan Marisa. Hal ini ditunjukkan oleh variabel Akuntabilitas yang memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,277, dan nilai probailitas sebesar 0,011 yang berarti Akuntabilitas mempengaruhi Pengelolaan Alokasi Dana Desa secara signifikan yaitu sebesar 27.7%. Terdapat pengaruh positif dan signifikan berupa variabel Transparansi dan Akuntabilitas terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Teratai Kecamatan Marisa secara simultan (bersama-sama), yang di dibuktikan bahwa nilai konstanta sebesar 12.419 menyatakan bahwa jika variabel Transparansi dan Akuntabilitas dianggap konstan, maka pengelolaan Alokasi Dana Desa sebesar 12.419. Sedangkan nilai koefisien regresi masing-masing variabel bebas yang diteliti jika meningkat satu satuan, maka pengelolaan Alokasi Dana Desa akan meningkat sebesar nilai koefisien variabel-variabel bebas tersebut.

Kata Kunci : Akuntabilitas dan Transparansi, ADD

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Jangan pernah puas dengan apa yang telah kita raih, karena kepuasan

Akan membuat kemunduran dalam suatu pencapaian .”

“Semangattlah dalam meraih cita-cita untuk mendapatkan keinginan

Yang sudah kita impikan. ”

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan untuk Ibunda tercinta (Murtin Mohamad) dan Ayahanda (Harjun Bangga) yang telah bersusah payah mendidiku dan mendoakanku sehingga sampai pada tahap ini. Terimah kasih juga kepada teman-teman dan seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan dan doa untukku bagiku mereka adalah segalanya..terimah kasih



ALMAMATERKU

UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

TEMPAT AKU MENIMBA ILMU

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur kehadiran Allah S.W.T serta salam dan taslim atas junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah

mengantar kita semua dari alam kegelapan ke alam terang sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Ilmiah yang berjudul **"Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Teratai Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato**. Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Teratai Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato.

Adapun Dalam penyusunan karya ilmiah ini, penulis menghadapi banyak hambatan karena kurangnya literature dan referensi dalam mendukung teori-teori, akan tetapi berkat petunjuk berbagai pihak akhirnya karya ilmiah ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dan penulis sangat menyadari bahwa masih terdapat kekurangan, oleh karena itu Penulis mengharapkan segala kritik dan saran yang sifatnya membangun ke arah perbaikan dan kesempurnaan karya ilmiah ini.

Melalui kesempatan ini tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Dr.Dra.Hj. Juriko Abdussamad, M.Si selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo.
2. Bapak DR. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si, selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
3. Bapak Dr. Arman, S.Sos.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo

4. Ibu Darmawati Abdrazak, S.IP.,M.AP selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Bapak Dr.Arman.,M.Si dan Bapak Umar S. Sune, S.Sos.,M.S1 selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, yang selalu membimbing dan memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh staf dosen dilingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
7. Terisitimewa Kedua orang tua tercinta yang selama ini telah bersusah payah membesarkan saya, dan telah banyak membantu mendoakan kesuksesan saya.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian karya tulis ini.

Gorontalo,..... 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	i
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iii
ABSTRACT.....	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO & PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Transparansi.....	9
2.1.1. Pengertian Transparansi.....	9
2.1.2. Indikator Transparansi.....	11
2.2. Konsep Akuntabilitas.....	14
2.2.1. Pengertian Akuntabilitas.....	14
2.2.2. Indikator Akuntabilitas.....	20
2.3. Alokasi Dana Desa.....	22
2.3.1. Desa.....	22
2.3.2. Pendapatan dan Belanja Desa.....	23
2.4. Pengelolaan Alokasi Dana Desa.....	26
2.5. Kerangka Konseptual.....	32

BAB III OBJEK METODE PENELITIAN

3.1. Objek dan Waktu Penelitian	35
3.2. Desain Penelitian.....	35

3.3. Definisi Operasional Variabel.....	35
3.4. Populasi dan Sampel.....	37
3.5. Jenis dan Sumber Data.....	37
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.7. Prosedur Penelitian.....	38
3.8. Metode Analisis.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	44
4.1.1. Sejarah Singkat Desa Teratai Kecamatan Marisa.....	44
4.1.2. Visi dan Misi Desa Teratai Kecamatan Marisa.....	50
4.1.3. Struktur Organisasi Desa Teratai Kecamatan Marisa.....	53
4.1.4. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi.....	54
4.2. Interpretasi Hasil Penelitian.....	60
4.2.1. Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas.....	60
4.2.2. Analisis Deskriptif Hasil Penelitian.....	62
4.2.3. Analisis Regresi Berganda.....	75
4.2.4. Analisis Koefisien Korelasi.....	76
4.2.5. Uji Hipotesis.....	77
4.3. Pembahasan Hasil Penelitian	78
BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan.....	84
5.2. Saran-Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel .1 : Sejarah Tokoh/Pemimpin Desa Teratai.....	44
---	----

Tabel 2 : Sejarah Pembangunan Desa.....	45
Tabel 3 : Potensi Desa Teratai.....	48
Tabel 4 : Demografi Desa Teratai Tahun 2020.....	48
Tabel 5 : Struktur Pemerintahan Desa.....	53
Tabel 6 : Hasil Uji Validitas X1.....	60
Tabel 7 : Hasil Uji Reliabilitas.....	61
Tabel 8 : Skala Penilaian Jawaban Responden.....	63
Tabel 9 : Nilai (Skor) Transparansi (X1).....	63
Tabel 10 : Nilai (Skor) Akuntabilitas (X1).....	69
Tabel 11 : Nilai (Skor) Alokasi Dana Desa (Y).....	73
Tabel 12 : Rangkuman Hasil Analisis Regresi Berganda.....	75

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Kuisioner

Lampiran 2. Olah Data SPSS

Lampiran 3 : Dokumentasi Penelitian

Lampiran 4 : Rekomendasi Penelitian

Lampiran 5 : Surat Rekom Bebas Plagiasi

Lampiran 6 : Similarity Hasil Turniting

Lampiran 7 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Akuntansi pemerintahan merupakan salah satu bidang ilmu akuntansi yang saat ini berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini disebabkan adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas politik atas dana-dana masyarakat yang di kelola pemerintah, sehingga memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintah. Akuntansi pemerintah memiliki tujuan pokok, yaitu pertanggungjawaban, manajerial, dan pengawasan. Pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah merupakan perwujudan dari pemyediaan informasi mengenai setiap tindakan atau kegiatan dan pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah selama satu periode. Akuntansi manajerial seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah. Akuntansi pemerintah juga harus memungkinkan terselenggaranta pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

Desa sebagai sistem pemeirntahan terkecil menuntut adanya pembaharuan guna mendukung pembangunan desa yang lebih meningkat dan tingkat kehidupan masyarakat desa yang jauh dari kemiskinan. Berbagai permasalahan yang ada di desa sangat kompleks, menjadikan alasan bagi desa untuk berkembang. Kemajuan pembangunan di setiap desa tidak kalah pentingnya. Pembangunan ini juga memerlukan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Pembangunan desa harus mencerminkan sikap gotong royong dan kebersamaan sebagai wujud

pengamalan sila-sila dalam pancasila demi mewujudkan masyarakat desa yang adil dan sejahtera. Perencanaan pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan kabupaten atau kota, sehingga perencanaan yang dibuat tersebut bisa tetap selaras. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa.

Guna menghindari kecurangan pada saat proses pengelolaan ADD, semua lapisan mulai dari aparat yang berwenang hingga masyarakat harus mengatur konsep dasar akuntabilitas dan transparansi agar tidak adanya sikap apatis dalam menjalankan segala sesuatu mulai dari perencanaan, pengelolaan hingga pertanggungjawaban. Konsep dasar akuntabilitas di dasarkan pada klasifikasi responsibility manajerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada tiap jajaran aparaturnya bertanggungjawab atas setiap kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali dan kegiatan yang tidak terkendali. Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang.

Menurut pasal 24 UU No 6 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas :

(a) kepastian hukum;

- (b) tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- (c) tertib kepentingan umum;
- (d) keterbukaan;
- (e) proporsionalitas;
- (f) profesionalitas;
- (g) akuntabilitas
- (h) eektivitas dan efisiensi;
- (i) kearifan lokal;
- (j) keberagaman;
- (k) partisipatif dari semua lapisan. Semua hal berkenaan pada dengan penyelenggaraan pemerintah tidak dapat serta merta dilakukan oleh satu pihak saja. Terdapat sanksi tegas jika salah satu unsur dalam undang-undang diatas tidak dijalankan.

Pemerintah desa juga dapat dijadikan cerminan terwujudnya good governance, dimana pemeirntah dan masyarakat memiliki hubungan yang erat dan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga mendorong akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas pemerintah lokal. Bahwa pronsip-prinsip good governance, diantaranya adalah partispasi masyarakatm tegaknya supremasu hukum, tumbuhnya transparansi yang di bangun atas dasar arus informasi yang bebas dan informasi perlu dapat di akses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan memadai, peduli pada stakeholder, berorientasi pada kesetaraan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas serta adanya visi strategis.

Pasal 2 tentang asas pengelolaan keuangan daerah dalam permendagri No. 113 tahun 2014, keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah diartikan sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah dalam rangka ekonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya. Mardiasmo (2009), akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Sang pemberi amanah (*principal*) berhak mengawasi dan mengontrol jalannya pengelolaan yang dilakukan oleh agent agar bisa meminimalisir terjadinya kecurangan.

Pengertian Alokasi Dana Desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari Bagi Hasil Pajak Daerah serta dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Sesuai dengan permendagri No. 113 tahun 2014 Tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di dalam Pasal 18 menyatakan bahwa, “Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten / Kota yang bersumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten / Kota untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen).

Pengelolaan Alokasi Dana Desa harus memenuhi beberapa prinsip pengelolaan seperti berikut:

- 1) Setiap kegiatan yang pendanaannya diambil dari Alokasi Dana Desa harus melalui perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi secara terbuka dengan prinsip: dari, oleh dan untuk masyarakat.
- 2) Seluruh kegiatan dan penggunaan Alokasi Dana Desa harus dapat dipertanggung jawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.
- 3) Alokasi Dana Desa harus digunakan dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
- 4) Jenis kegiatan yang akan didanai melalui Alokasi Dana Desa diharapkan mampu untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa dengan pengambilan keputusan melalui jalan musyawarah.
- 5) Alokasi Dana Desa harus dicatat di dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa melalui proses penganggaran yang sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Namun, dari hasil observasi penulis didapatkan bahwa pemerintah desa khususnya diwilayah kecamatan marisa seolah-olah menutup diri atau kurang

terbuka kepada masyarakat mengenai penggunaan Alokasi Dana Desa di setiap desa, masih terdapat beberapa kecurangan yang dilakukan oleh pemerintah desa terkait dengan pengelolaan dana desa seperti ADD tersebut lebih banyak digunakan untuk belanja aparat dalam hal ini pembayaran gaji aparatur dan BPD sehingga meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa terabaikan. Olehnya itu pengelolaan dan penggunaan ADD tersebut yang tidak sesuai dengan peruntukannya kemudian tidak ada transparansi atau keterbukaan kepada masyarakat, disamping ketidak terbukaan tersebut juga menimbulkan pertanyaan yang berdampak pada akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut diatas, peneliti berusaha menguji tingkat transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Desa dalam mengelola kinerja keuangan, dengan objek penelitian yaitu Pemerintah Desa teratai kecamatan marisa yang menggunakan laporan pertanggungjawaban ADD tahun 2020. Dengan demikian maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **"Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Teratai Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato"**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan kajian tentang permasalahan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut, maka dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa (X) secara *Simultan* terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y) di Desa Teratai Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato?
2. Seberapa besar pengaruh Transparansi (X1) dan Akuntabilitas (X2) Pemerintah Desa secara *Parsial* terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y) di Desa Teratai Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah ;

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa (X) secara *Simultan* terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y) di Desa Teratai Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Transparansi (X1) dan Akuntabilitas (X2) Pemerintah Desa secara *Parsial* terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y) di Desa Teratai Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam pengembangan keilmuan pada program studi ilmu pemerintahan yang berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan ADD.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat desa mengenai pengelolaan ADD sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam mensukseskan pelaksanaan ADD.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Transparansi

2.1.1. Pengertian Transparansi

Permendagri Nomor 113 tahun 2014, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Menurut Mardiasmo (2009:52), transparansi berarti keterbukaan pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Transparansi informasi terutama informasi keuangan dan fisik harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami. Transparansi dapat dilakukan apabila ada kejelasan tugas kewenangan, ketersediaan informasi kepada publik, proses penganggaran yang terbuka, dan jaminan integritas dari pihak independen mengenai prakiraan fisik, informasi, dan penjabarannya.

Menurut Andrianto (2007:43), transparansi publik adalah suatu keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh penyelenggara harus dapat

diakses secara terbuka dengan memberi ruang yang cukup bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara luas didalamnya.

Beberapa manfaat penting dengan adanya transparansi anggaran menurut (Andrianto, 2007:76), yaitu:

- 1) Mencegah korupsi.
- 2) Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan.
- 3) Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja pemerintah.
- 4) Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk memutuskan kebijakan tertentu.
- 5) Mengutarakan koleksi sosial, karena kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terbentuk.

Standar Akuntansi Pemerintah menjelaskan bahwa transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandate dari rakyat. Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap

mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan demikian transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi.

2.1.2. Indikator Transparansi

Menurut Andrianto (2007:21), bahwa indikator transparansi terdiri dari :

1. Ada tidaknya kerangka kerja hukum bagi transparansi.
 - a) Adanya peraturan perundangan yang mengatur persoalan transparansi.
 - b) Adanya kerangka kerja hukum yang memberi definisi yang jelas tentang peran dan tanggungjawab bagi semua aspek kunci dari manajemen fiskal.
 - c) Adanya basis legal untuk pajak.
 - d) Adanya bisnis legal untuk pertanggungjawaban belanja dan kekuasaan memungut pajak dari pemerintah daerah.
 - e) Adanya pembagian peran dan tanggungjawab yang jelas dari masing-masing tingkat pemerintahan.
2. Adanya akses masyarakat terhadap transparansi anggaran.
 - a) Adanya keterbukaan dalam rangka kerja anggaran (proses penganggaran).
 - b) Diumumkan setiap kebijakan anggaran.
 - c) Dipublikasikan hasil laporan anggaran (yang telah diaudit oleh lembaga yang berwenang).
 - d) Adanya dokumentasi anggaran yang baik yang mengandung beberapa indikator fiskal.
 - e) Terbukanya informasi tentang pembelanjaan aktual.
3. Adanya audit independen dan efektif
 - a) Adanya lembaga audit yang independen dan efektif.

- b) Adanya kantor statistik yang akurasi datanya berkualitas.
 - c) Adanya sistem peringatan dini (*early warning system*) dalam kasus buruknya eksekusi atau keputusan anggaran.
4. Adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran.
- a) Adanya keterburkaan informasi selama proses penyusunan anggaran.
 - b) Adanya kesempatan bagi masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam proses penganggaran.

Laporan keuangan daerah dapat dikatakan transparan apabila memenuhi peraturan berikut yang terutang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

- a. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis.
- b. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD diinformasikan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.
- c. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati melalui camat.
- d. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Kerangka Transparansi dan akuntabilitas publik dibangun paling tidak atas lima komponen (Mardiasmo:2009:73) yaitu :

1. Sistem perencanaan strategik

Rencana strategis adalah suatu proses yang membantu organisasi untuk memikirkan tentang sasaran yang harus diterapkan untuk memenuhi misi mereka dan arah apa yang harus direncanakan untuk mencapai sasaran tersebut. Hal tersebut adalah dasar dari semua perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi suatu kegiatan organisasi.

2. Sistem pengukuran kinerja

Rencana kinerja menekankan komitmen organisasi untuk mencapai hasil tertentu sesuai dengan tujuan, sasaran, dan strategi dari rencana strategis organisasi untuk permintaan sumberdaya yang dianggarkan. Pengukuran kinerja adalah proses berjalan untuk merencanakan dan memonitor kinerja. Penilaian ini membandingkan kinerja aktual selama review tertentu dengan kinerja yang direncanakan. Dari hasil perbandingan tersebut, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan, perubahan atas kinerja yang diterapkan dan arah masa depan bisa direncanakan.

3. Sistem pelaporan keuangan

Dipublikasikan tahunan atau setiap periode tahun berjalan, maksimal satu bulan setelah satu tahun berjalan. Laporan akuntabilitas termasuk program dan informasi keuangan, seperti laporan keuangan yang telah diaudit dan indikator kinerja yang merefleksikan kinerja dalam hubungannya dengan pencapaian tujuan utama organisasi.

4. Saluran akuntabilitas publik

Kesepakatan kinerja didesain, dalam hubungannya antara dengan yang melaksanakan pekerjaan untuk menyediakan sebuah proses untuk mengukur kinerja dan bersamaan dengan itu membangun akuntabilitas.

5. Auditing sektor publik

Dimana organisasi memonitor kinerjanya dan mengevaluasi kemampuannya mencapai tujuan kinerja, ukuran pencapaian kinerjanya dan tahapan-tahapan, serta mengendalikan dan meningkatkan proses itu.

2.2. Konsep Akuntabilitas

2.2.1. Pengertian Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2009:18), Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Nasirah (2016:24) Akuntabilitas juga merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil serta cara-cara yang digunakan untuk mencapai semua itu. Pengendalian (*control*) sebagai bagian penting dalam manajemen yang baik adalah hal yang saling menunjang dengan akuntabilitas. Dengan kata lain pengendalian tidak dapat berjalan efisiensi dan efektif bila tidak ditunjang dengan mekanisme akuntabilitas yang baik dan juga sebaliknya.

Secara garis besar mengenai penjelasan akuntabilitas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa akuntabilitas adalah merupakan pertanggungjawaban oleh lembaga yang diberi wewenang dalam mengelola sumber daya publik.

Akuntabilitas publik terdiri atas 2 macam menurut (Mardiasmo, 2009:21) , yaitu:

1) Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*)

Pertanggungjawaban vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.

2) Akuntabilitas horisontal (*horizontal accountability*)

Pertanggung jawaban horizontal adalah pertanggung jawaban kepada masyarakat luas.

Akuntabilitas perlu dilakukan melalui media yang selanjutnya dapat dikomunikasikan kepada pihak internal maupun pihak eksternal (publik), secara periodik maupun secara tak terduga sebagai suatu kewajiban hukum dan bukan karena sukarela. Akuntabilitas mempunyai 2 (dua) tipe, yaitu:

1) Akuntabilitas Internal, berlaku untuk setiap tingkatan dalam organisasi internal penyelenggaraan negara termasuk pemerintah dimana setiap jabatan atau petugas publik baik individu atau kelompok berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada atasan langsung mengenai perkembangan kinerja atau hasil pelaksanaan kegiatannya secara periodik atau sewaktu-waktu bila dipandang perlu.

- 2) Akuntabilitas Eksternal, terdapat pada setiap lembaga negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima dan telah pula dilaksanakan untuk kemudian dikomunikasikan kepada pihak eksternal dan lingkungannya.

Mardiasmo (2009:23) menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu :

- 1) Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*), terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum (*legal accountability*) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.
- 2) Akuntabilitas proses (*process accountability*), terkait dengan apakah yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.
- 3) Akuntabilitas program (*program accountability*), terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dan biaya yang minimal.
- 4) Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*), terkait dengan pertanggung jawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah menurut (Mardiasmo, 2009: 105) sebagai berikut :

1) Prinsip Transparansi

Transparansi adalah dalam proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran daerah. Transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat.

2) Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

3) Prinsip *value for money*

Prinsip *value for money* disini berarti diterapkan tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektif. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang murah. Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal (berdaya guna). Efektivitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntabilitas bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas dana

yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam peningkatan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Ihyaul Ulum (2010:41) dalam bukunya "Akuntansi Sektor Publik", mengemukakan dua jenis akuntabilitas yaitu:

a. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai:

a) Integritas Kuangan

Menurut kamus Bahasa Indonesia, integritas adalah kejujuran, keterpaduan, kebulatan, keutuhan. Dengan kata lain integritas keuangan mencerminkan kejujuran penyajian. Kejujuran penyajian adalah bahwa harus ada hubungan atau kecocokan antara angka dan deskripsi akuntansi dan sumber-sumbernya. Integritas keuangan pun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka mengenai laporan keuangan daerah. Agar laporan keuangan dapat diandalkan informasi yang terkandung didalamnya harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b) Pengungkapan

Konsep *full disclosure* (pengungkapan lengkap) mewajibkan laporan keuangan didesain lain disajikan sebagai kesimpulan potret dari kejadian ekonomi yang mempengaruhi instansi pemerintah untuk suatu periode dan berisi cukup informasi. Yang menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan sehingga

membuat pemakai laporan keuangan paham dan tidak salah tafsir terhadap laporan keuangan tersebut.

c) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah harus menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain :

- 1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia khususnya yang mengatur mengenai keuangan Negara,
- 2) Undang-undang Perbendaharaan Indonesia,
- 3) Undang-undang APBN,
- 4) Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah daerah.
- 5) Peraturan perundang-undangan yang mengatur perimbangan keuangan pusat dan daerah,
- 6) Ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan APBN/APBD,
- 7) Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan pusat dan daerah.

Apabila terdapat pertentangan antar standar akuntansi keuangan pemerintah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

b. Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas Kinerja bisa dilihat dalam perspektif Islam yang menggambarkan suatu pertanggungjawaban yang mutlak. Sebagai salah satu sifat Nabi yakni Amanah dalam menjalankan tugas atau wewenang yang berkaitan erat dengan teori Agensi dari Akuntansi sendiri. Bila melihat dari sisi lain maka Akuntabilitas biasanya akan dilihat dari sudut stakeholder teori yang merupakan pengembangan dari teori Keagenan (agensi teori) dimana pertanggungjawaban dari teori agensi menekankan pertanggungjawaban pada agen (pelaksana).

Tujuan utama dari konsep akuntabilitas adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban tim pelaksana pengelolaan alokasi dana desa (ADD) kepada masyarakat, dimana kepala desa sebagai penanggungjawab utama.

Menurut Andrianto (2007:23), pemerintah yang *accountable* mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a) Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat.
- b) Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik.
- c) Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan.
- d) Mampu menjalankan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional.
- e) Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah. Dengan pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program/kegiatan pemerintah.

2.2.2. Indikator Akuntabilitas

Sesuai Permendagri Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa beberapa indikator yang dilakukan untuk pengukuran dalam penelitian ini yakni :

1. Tahap Perencanaan

- a. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
- b. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- c. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- d. Laporan Pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

2. Tahap Pelaporan

- a. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/ Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.
- b. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa
- c. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- d. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir

3. Tahap Pertanggungjawaban

- a. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- c. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Media akuntabilitas yang memadai dapat berbentuk laporan yang dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi, karena pencapaian tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi. Tujuan tersebut dapat dilihat dalam rencana strategik organisasi, rencana kinerja, dan program kerja tahunan, dengan tetap berpegang pada Rencana Jangka Panjang dan Menengah (RJPM) dan Rencana Kerja Permerintah (RKP).

2.3. Alokasi Dana Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen), yang pembagiannya untuk desa secara propesional.

2.3.1. Desa

Pengertian desa menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 yang tertuang dalam pasal 1 (satu) ayat menjelaskan bahwa : “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pemerintah desa yang dijelaskan dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang bertujuan untuk Pembangunan Desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Salah satu cara pemerintah desa untuk membangun desa yakni dengan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

2.3.2. Pendapatan dan Belanja Desa

2.3.2.1. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak pernah dibayar kembali oleh desa. Pendapatan Desa terdiri atas kelompok :

1) Pendapatan Asli Desa (PADesa)

- a) Hasil usaha deasa antara lain : hasil Bumdes, tanah kas desa.
- b) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yaitu dinilai dengan uang.

2) Transfer Kelompok transfer sebagaimana dimaksud terdiri atas jenis :

- a) Dana Desa;
- b) Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah;
- c) Alokasi Dana Desa (ADD);
- d) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
- e) Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.

3) Pendapatan Lain-Lain Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud terdiri atas jenis :

- a) Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
- b) Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

2.3.2.2. Belanja Desa

Belanja Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penghargaan dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggara yang

tidak akan dioeroleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa sebagaimana dimaksud dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud, terdiri atas kelompok:

1) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri atas :

a) Belanja pegawai

Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD yang dibayarkan setiap bulan.

b) Belanja barang

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian atau pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud antara lain : (a) alat tulis kantor; (b) benda pos; (c) bahan/material; (d) pemeliharaan; (e) cetak/penggandaan; (f) sewa kantor desa; (g) sewa perlengkapan dan peralatan kantor; (h) makanan dan minuman rapat; (i) pakaian dinas dan atributnya; (j) perjalanan dinas; (k) upah kerja (l) honorarium narasumber/ahli; (m) operasional Pemerintah Desa; (n) operasional BPD; (o) insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan (p) pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

c) Belanja modal Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.

- 2) Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- 3) Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- 4) Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- 5) Belanja Tak Terduga

2.3.2.3. Pembiayaan Desa

Penerimaan Pembiayaan mencakup :

1. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;

SiLPA sebagaimana dimaksud antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dan akegiatan lanjutan, SiLPA sebagaimana dimaksud merupakan pembiayaan yang digunakan untuk :

- a. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada belanja;
- b. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan;
- c. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

2. Pencairan Dana Cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggrkan pencairan dana cadangan dari rekening dan cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.

3. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan

Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan untuk menggambarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

2.3.2.4. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan yang dimaksud adalah Pembentukan Dana Cadangan. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan desa paling sedikit memuat :

- a) Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- b) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- c) Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
- d) Sumber dana cadangan;
- e) Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

2.4. Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pengelola ADD adalah tim yang dibentuk oleh Pemerintah Desa dengan Surat Ketetapan Kepala Desa, tim ini disebut dengan tim pelaksana kegiatan ADD. Tim pengelola ADD terdiri dari Kepala Desa sebagai Ketua, Sekertaris Desa sebagai Penanggungjawab Operasional Kegiatan (POJK), Anggota yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh organisasi dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan.

Bagian dari ADD yang digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar-sebesaranya 30% (tiga puluh persen) dan 70% (tujuh puluh persen) digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar-sebesaranya 30% (tiga puluh persen) dapat digunakan antara lain :

- a. Pembelian Alat Tulis Kantor.
- b. Pembayaran rekening listrik, telepon dan air kantor.

- c. Biaya fotocopy, cetak dan penggandaan.
- d. Biaya pemeliharaan kantor.
- e. Biaya perlengkapan kantor.
- f. Biaya perawatan kantor.
- g. Biaya konsumsi rapat-rapat.
- h. Biaya perjalanan dinas aparat Pemerintah Desa dan BPD.
- i. Uang kehormatan BPD.
- j. Dan kegiatan lain yang dianggap penting

Untuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat sebesar-besarnya 70% (tujuh puluh persen) dapat digunakan antara lain:

- a. Biaya perbaikan sarana publik skala kecil.
- b. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa.
- c. Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan.
- d. Perbaikan lingkungan dan pemukiman.
- e. Teknologi tepat guna.
- f. Perbaikan kesehatan dan pendidikan.
- g. Pengembangan Sosila, Budaya dan Keagamaan.
- h. Biaya kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong.
- i. Biaya kegiatan Perlombaan Desa.
- j. Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
- k. Kegiatan kepemudaan (Karang Taruna, olahraga, dsb).
- l. Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional/Islam.
- m. Bantuan Biaya Pemilihan Kepala Desa dan Kepala Dusun.

- n. Pembinaan RT dan RW.
- o. Dan kegiatan lain yang dianggap penting.

Tahapan pengelolaan ADD di atur secara garis besar mulai dari tahap Perencanaan, Pelaksanaan Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, dan Pembinaan dan Pengawasan sebagai berikut :

1. Tahap Perencanaan

Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah. Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa meliputi :

- a. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
- b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
- c. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
- d. pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan
- e. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa

Dalam tahap perencanaan Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa berdasarkan RKPDDesa tahun berkenaan. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa kepada Kepala Desa. Rancangan peraturan Desa tentang APBDDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa.

2. Tahapan Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam pengelolah ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksanaan Desa, selanjutnya guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan kegiatan kegiatan fisik ADD wajib dilengkapi dengan Papan Informasi Kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Semua penerimaan dan pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Pengaturan jumlah uang

dalam kas desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota disahkan oleh Kepala Desa.

3. Tahapan Penatausahaan

Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran menggunakan :

a. Buku kas umum

Buku kas umum digunakan untuk mencatat semua aktifitas yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran kas, baik yang terjadi secara tunai maupun kredit.

b. Buku Kas Pembantu Pajak

Buku kas pembantu pajak digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.

c. Buku Bank

Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.

4. Tahapan Pelaporan

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:

- a. Laporan semester pertama Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- b. Laporan semester akhir tahun. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

5. Tahapan Pertanggungjawaban

Pertanggung jawaban penggunaan ADD terintegrasi dalam pertanggung jawaban APBD desa adalah penanggung jawab utama. Semua penggunaan dana ADD harus dapat dipertanggung jawabkan secara formil maupun materil, dan surat pertanggungjawaban (SPJ) disimpan oleh desa sebagai objek pemeriksaan yang salinannya dikirim ke Kecamatan.

2.5. Kerangka Konseptual

Pengelola ADD adalah tim yang dibentuk oleh Pemerintah Desa dengan Surat Ketetapan Kepala Desa, tim ini disebut dengan tim pelaksana kegiatan ADD. Tim pengelola ADD terdiri dari Kepala Desa sebagai Ketua, Sekertaris Desa sebagai Penanggungjawab Operasional Kegiatan (POJK), Anggota yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh organisasi dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan.

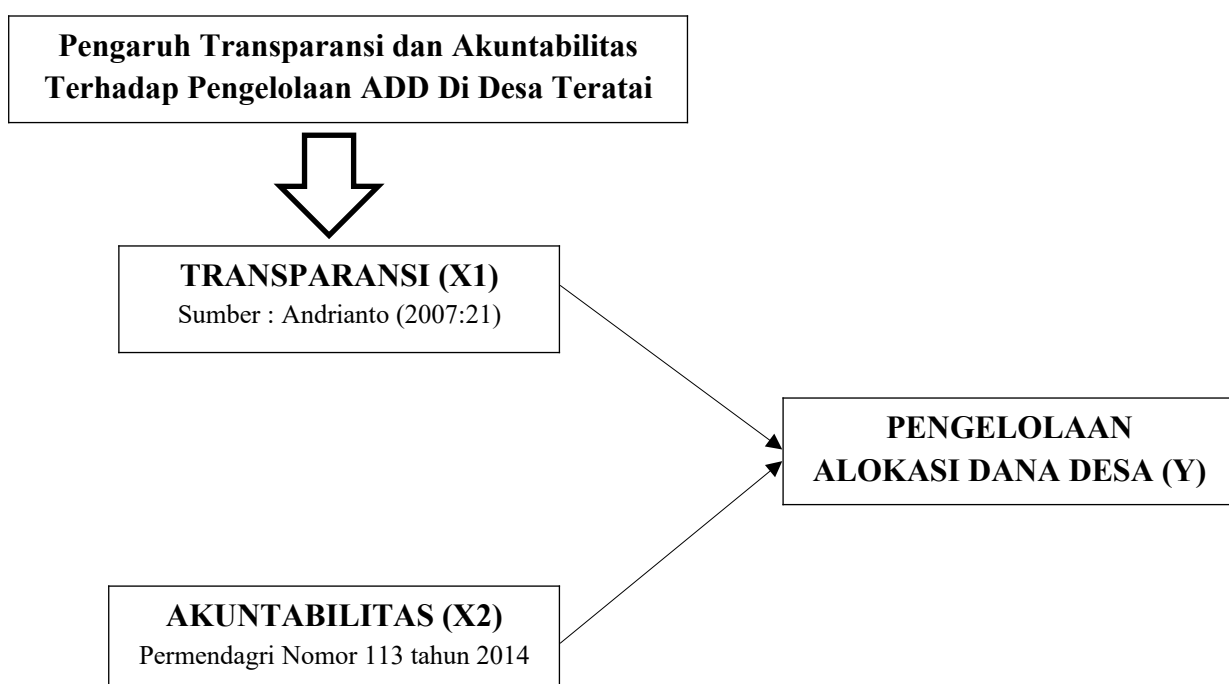
Permendagri Nomor 113 tahun 2014, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa taransparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses

informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Permendagri Nomor 113 tahun 2014, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa taransparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Adapun kerangka konsep dalam penelitian ini di gambarkan seperti dibawah ini :

Gambar : Kerangka Konseptual Penelitian



2.6. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan dan kajian pustaka diatas, maka penulis dapat merumuskan hipotesis sebagai jawaban sementara dalam penelitian ini yakni sebagai berikut :

3. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel Transparansi dan Akuntabilitas (X) secara *Simultan* terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y) di Desa Teratai Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato.
4. Terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel Transparansi (X1) dan variabel Akuntabilitas (X2) secara *Parsial* terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y) di Desa Teratai Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Objek Dan Waktu Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan kerangka konseptual yang diuraikan pada bab sebelumnya, maka yang menjadi objek penelitian adalah mengenai Transparansi dan Akuntabilitas serta pengaruhnya terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Penelitian ini direncanakan dilakukan selama 3 (tiga) bulan bertempat di Desa Teratai Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato.

3.2. Desain Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis memilih jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yang menggambarkan adanya pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas (X) terhadap Pengelolaan ADD (Y). Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Survei.

Kerlinger (2007) dalam Riduwan (2007:49) mengatakan bahwa penelitian survey adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi dan hubungan antar variable sosiologis dan psikologis.

3.3. Definisi Operasional Variabel

Adapun variabel dalam penelitian ini terdiri dari Variabel Bebas (X) dan Variabel Terikat (Y), yang di operasionalisasikan dalam bentuk matriks seperti dibawah ini :

Tabel-1 : Matriks Operasionalisasi Variabel

Variabel Penelitian	Dimensi/Indikator	Skala Pengukuran
Transparansi (X1)	1. Ada tidaknya kerangka kerja hukum bagi transparansi 2. Adanya akses masyarakat terhadap transparansi anggaran 3. Adanya audit independen dan efektif 4. Adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran	Skala Likert
Akuntabilitas (X2)	1. Tahap Perencanaan 2. Tahap Pelaporan 3. Tahap Pertanggungjawaban	Skala Likert
Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y)	1. Perencanaan 2. Pelaksanaan 3. Penatausahaan 4. Pelaporan 5. Pertanggungjawaban	Skala Likert

Sumber : Andrianto (2007:21), Permendagri Nomor 113 tahun 2014

Dalam melakukan test dari masing-masing variabel akan diukur dengan menggunakan skala likert. Kuisisioner disusun dengan menyiapkan 5 (lima) pilihan yakni :Sanga tSetuju, Setuju, Ragu-ragu, Tidak Setuju, Sangat Tidak Setuju.

Setiap pilihan akan diberikan bobot nilai yang berbeda seperti tampak dalam tabel berikut ini :

Tabel-2 : Bobot Nilai Variabel

Pilihan	Bobot
Sangat Setuju /Selalu	5
Setuju /Sering	4
Ragu-ragu/Kadang-kadang	3
Tidak Setuju /Jarang	2
Sangat Tidak Setuju /Tidak Pernah	1

Sugiyono, (2008:71)

3.4. Populasi dan Sampel

3.4.1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2008). Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Aparat Desa, BPD dan Tokoh-Tokoh Masyarakat Desa Teratai.

3.4.2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2008). Adapun teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yakni sampel pertimbangan atau subjektif, dimana peneliti mempertimbangkan bahwa hanya orang-orang tertentu yang memahami dan mengetahui serta memiliki informasi yang memenuhi kriteria yang ditentukan peneliti. Adapun sampel dalam penelitian ini terdiri dari kepala desa dan aparat desa yang berjumlah 14 orang kemudian BPD Desa teratai berjumlah 9 orang dan di tambah dengan tokoh-tokoh

masyarakat yang telah ditentukan oleh peneliti yakni berjumlah 15 orang. Sehingga jumlah sampel yang dijadikan responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 38 orang.

3.5. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari para responden tempat penelitian dengan sumber datanya adalah kuesioner.
2. Data Sekunder, yaitu data yang sudah dipublikasikan oleh pihak lain, dan sumber datanya adalah berupa dokumen-dokumen dan laporan tertulis yang ada kaitannya dengan objek penelitian, dan lain-lain.

3.6. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengambilan data sebagai berikut :

1. Observasi adalah melihat secara langsung serta mencari informasi yang ada kaitannya dengan penelitian.
2. Angket atau Kuesioner adalah memberikan daftar pertanyaan kepada setiap responden sebagai alat pengumpul data.

3.7. Prosedur Penelitian

Untuk mendapatkan data yang baik dalam arti mendekati kenyataan (obyektif) sudah tentu diperlukan suatu instrumen atau alat pengumpul data yang baik dan yang lebih penting lagi adanya alat ukur yang valid dan andal (*reliable*). Dan untuk dapat meyakini bahwa instrumen atau alat ukur yang valid dan andal,

maka instrumen tersebut sebelum digunakan harus diuji validitas dan reliabilitasnya sehingga apabila digunakan akan menghasilkan data objektif.

3.7.1 Uji Validitas

Menurut Arikunto (2001:219) Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau keahlian suatu instrumen yang bersangkutan mampu mengukur apa yang diukur. Uji Validitas dilakukan dengan mengkorelasikan masing-masing pernyataan dengan jumlah skor untuk masing-masing variabel. Selanjutnya dalam memberikan interpretasi terhadap koefisien korelasi. Menurut Masrun, yang dikutip Sugiyono (1999:106) menyatakan item yang mempunyai korelasi positif dengan kriterium (skor total) dan korelasinya tinggi, menunjukkan bahwa item tersebut mempunyai validitas yang tinggi pula. Untuk pengujian menggunakan rumus angka kasar sebagai berikut :

$$r_{XY} = \frac{n\sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{((n\sum X^2) - (\sum X)^2)((n\sum Y^2) - (\sum Y)^2)}}$$

dimana :

r	=	Koefisien Korelasi
X	=	Variabel bebas (Independent)
Y	=	Variabel terikat (Dependent)
n	=	Banyaknya sampel

Selanjutnya dihitung dengan uji t dengan rumus:

$$r \sqrt{n-2}$$

$$t_{\text{hitung}} = \frac{\quad}{\sqrt{1-r^2}}$$

Dimana:

t = Nilai t hitung

n = Jumlah responden

r = Koefisien korelasi hasil r hitung

Selanjutnya angka korelasi yang diperoleh berdasarkan hasil perhitungan di transformasi ke nilai t – student dan di bandingkan dengan tabel – t pada derajat bebas (n-2), taraf signifikansi yang dipilih. Bila nilai t yang diperoleh berdasarkan perhitungan nilainya lebih besar dari nilai t tabel maka pertanyaan dikatakan valid, dan bila nilai t dibawah atau sama dengan nilai t tabel maka pertanyaan dikatakan tidak valid. Sedangkan untuk mengetahui tingkat validitas besarnya pengaruh masing-masing variabel atau besarnya koefisien korelasinya dengan menggunakan interpretasi koefisien korelasi, seperti pada tabel 3, berikut :

Tabel-3

Interpretasi koefisien korelasi

R	Keterangan
0,000 < 0,199	Korelasi sangat rendah
0,200 < 0,399	Korelasi rendah
0,400 < 0,699	Korelasi sedang
0,700 < 0,899	Korelasi Tinggi
0,900 < 1,000	Korelasi sangat tinggi

--	--

3.7.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas atau keandalan bertujuan untuk mengukur keandalan alat ukur dengan cara memberikan skor yang relative sama pada seorang responden, walaupun responden mengerjakannya dalam waktu yang berbeda. Uji dilakukan menggunakan teknik belah dua dari *Spearman Brown*, yang langkah-langkah kerjanya sebagai berikut :

1. Membagi pernyataan-pernyataan menjadi dua belahan
2. Skor untuk masing-masing pernyataan pada tiap belahan dijumlahkan, sehingga menghasilkan dua skor total untuk masing-masing responden.
3. Mengkorelasikan skor total belahan pertama dengan belahan kedua, dengan menggunakan teknik korelasi *Product Moment*.
4. Angka korelasi yang diperoleh adalah angka korelasi dari alat pengukur yang dibelah (split-half), maka angka korelasi yang lebih rendah dari pada angka yang diperoleh jika alat ukur itu tidak dibelah, seperti pada teknik *test-retest*.

$$2 r_b$$

dimana:

r_i = Reliabilitas internal seluruh instrumen atau pernyataan

r_b = Korelasi *product moment* antara belahan pertama dan kedua

Reliabel setiap pernyataan akan ditunjukkan dengan hasil r_i positif dan r_i hitung > r tabel, berarti seluruh item pernyataan adalah reliabel/handal.

3.7.3. Konversi data

Proses transformasi data dari skala pengukuran ordinal ke skala pengukuran interval dapat dilakukan melalui suatu metode transformasi data yang dikenal *method of successive interval*, (Hays: 1976:39-42, dalam Riduwan 2009:30). Pada umumnya jawaban responden yang diukur dengan menggunakan skala likert (*Lykert scale*) diadakan scoring yakni pemberian nilai numerikal 1,2,3,4 dan 5, setiap skor yang diperoleh akan memiliki tingkat pengukuran ordinal. Nilai numerikal tersebut dianggap sebagai objek dan selanjutnya melalui proses transformasi ditempatkan kedalam interval, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Untuk setiap pertanyaan Hitung frekuensi (f) setiap skor (1 sampai dengan 5) dari responden yang memberikan tanggapannya
2. Hitung proporsi dengan membagi jumlah f (frekuensi) dengan jumlah n sampel
3. Tentukan proporsi kumulatif dengan menjumlahkan proporsi secara berurutan setiap responden
4. Proporsi kumulatif dianggap mengikuti distribusi normal baku. Selanjutnya, hitung nilai Z berdasarkan pada proporsi kumulatif tadi
5. Dari nilai Z yang diketahui tersebut, tentukan nilai density-nya dengan menggunakan tabel 4 (*ordinates Y the Normal Curve a Z*).

6. Menghitung SV untuk masing-masing pilihan dengan rumus :

$$SV \text{ (scale value)} = \frac{(\text{density at lower limit}) - \text{density at upper limit}}{(\text{area under upper limit}) - (\text{density under lower limit})}$$

Keterangan :

density at lower limit : Kepadatan batas bawah

density at upper limit : Kepadatan batas atas

area under upper limit : Daerah dibawah batas atas

area under upper limit : Daerah dibawah batas bawah

3.8. Metode Analisis

Dalam menganalisa dan menguji Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan ADD, maka penulis melakukan perhitungan dengan menggunakan rumus regresi berganda. Dan selanjutnya dilakukan uji signifikan dengan menggunakan uji t. Dimana variabel X1 adalah Transparansi, Variabel X2 adalah Akuntabilitas, serta variabel Y adalah Pengelolaan ADD. dengan rumus Regresi berganda, sebagai berikut :

1. Regresi berganda

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + \epsilon$$

dimana :

Y = Pengelolaan ADD

a = Konstanta

b1, b2, = Koefisien Regresi

X1	= Transparansi
X2	= Akuntabilitas
ϵ	= Faktor Pengganggu

2. Rumus Korelasi *Person Product Moment*

$$r_{XY} = \frac{n\sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{((n\sum X^2) - (\sum X)^2)((n\sum Y^2) - (\sum Y)^2)}}$$

dimana :

r_{xy}	=	Koefisien Korelasi
X	=	Variabe bebas (Independent)
Y	=	Variabel terikat (Dependent)
n	=	Banyaknya sampel

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Sejarah Singkat Desa Teratai Kecamatan Marisa

1) Sejarah berdirinya desa

Desa Teratai yang berdiri sejak tahun 1986 merupakan Desa pemekaran dari Desa Marisa Utara. Kata “Teratai” diadopsi oleh tokoh masyarakat dari tumbuhan berkembang di danau yang berada disebelah Timur Desa. Sumber pendapatan masyarakatnya mayoritas sebagian besar dari pertanian dan buruh tambang emas yang dalam hal ini masih banyak masyarakat Desa Teratai yang hanya menjadi Buruh Tani dan Penambang Emas saja, tanpa memiliki lahan sendiri dan lokasi penambangan emas. Bahasa yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat Desa adalah Bahasa Gorontalo, Bahasa Manado dan Bahasa Indonesia serta budaya gotong royong yang tetap terpelihara dari dahulu hingga saat ini.

**Tabel-1 Sejarah Tokoh/Pemimpin Desa Teratai
Nama-Nama Kepala Desa Sebelum Dan Sesudah Berdirinya Desa Teratai**

No	Periode	Nama Kepala Desa	Lama Menjabat	KET.
1	1986 – 1990	KARIM THALIB	5 Tahun	Definitif
2	1990 – 1991	DANTJE DJAU	1 Tahun	Definitif
3	1991 – 1999	ALI YUSUF	9 Tahun	Definitif
4	1999 – 2000	ABDULLAH SALEH	1 Tahun	Definitif
5	2000 – 2003	NURDIN HIOLA	4 Tahun	Definitif
6	2003 – 2004	DARWIN TOLINGGUHU	1 Tahun	Plt
7	2004 – 2005	HARUN ALI	1 Tahun	Plt
8	2005 – 2011	HAMZAH HASAN	6 Tahun	Definitif

9	2011 – 2013	UCO BAKARI	2 Tahun	Definitif
10	2013 – 2014	MUZNA GIASI	1 Tahun	Plt
11	2014 – 2019	MISRA BOTUTIHE	6 Tahun	Definitif
12	Okt – Des 2019	ALWIN SULEMAN	3 Bulan	Plt
13	2020 – 2026	SIMSON HASAN	6 Tahun	Definitif

Tabel-2
Sejarah Pembangunan Desa

No	Pembangunan/Kegiatan	Tahun	Keterangan
1	Pembangunan kantor desa	1987	Swadaya
2	Pembangunan Rumah Layak Huni	2006	APBD
3	Gudang Gapoktan	2007	APBD
4	Lapangan Olahraga	2008	APBD
5	Pembangunan Mahyani Provinsi	2011	APBN Prov
6	Pembangunan tambak Budi Daya Ikan Air Tawar	2011	Swadaya
7	Bantuan Rehab Rumah	2012	APBN Prov
8	Jalan Rabat Beton	2012	PNPM Mandiri
9	Pembukaan Jalan PPIP	2013	APBN
10	Posyandu	2013	PNPM Mandiri
11	Rumah Layak Huni	2013	APBD
12	Rumah Layak Huni	2014	APBD
13	Gedung PAUD	2014	APBD
14	Gedung BPD	2014	APBD
15	Pembangunan GOR Pohuwato	2014	APBD
16	Rumah Layak Huni	2015	APBD
17	Pembangunan Rumah Susun (RUSUNAWA)	2015	APBD
18	Pembangunan Kolam Renang	2015	APBD
19	Jalan Rabat Beton	2015	APBN
20	Jamban Sehat	2015	APBN
21	Pembukaan jalan	2015	APBN

22	Rumah Layak Huni	2016	APBD
23	Pembukaan Jalan	2016	APBN
24	Jalan Rabat Beton	2016	APBN
25	Jamban Sehat	2016	APBN
26	Plat Deker	2016	APBN
27	Tapal batas desa dan dusun	2016	APBN
28	Rehab Rumah	2018	APBN
29	Peningkatan Sarpras Olahraga	2019	APBN
30	Pembangunan Panggung Kesenian	2020	APBN

Desa Teratai memiliki luas 18 KM² yang kini dalam pemetaan wilayah oleh BPS Propinsi. Sebagian besar penduduk Desa Teratai adalah petani lahan kering (kebun jagung) yang luasnya \pm 400 Ha, dan memiliki danau seluas \pm 10 Ha yang selama ini pengelolaannya baru dimulai oleh kelompok masyarakat budi daya ikan air tawar dan kedepan potensi ini dapat dikembangkan menjadi sentral produksi ikan air tawar yang ada di Kabupaten Pohuwato serta dapat dikembangkan menjadi wisata pancing yang akan menggenjot Pendapatan Asli Desa Teratai Kedepan.

Wilayah Desa Teratai juga cocok untuk mengembangkan peternakan, khususnya untuk beternak sapi atau kambing. Dikarenakan kemudahan dalam hal mendapatkan makanan pokok ternak serta lahan pertanian yang masih cukup luas memudahkan mengembalakan ternak tersebut.

Mengacu pada peta wilayah propinsi Gorontalo, Desa Teratai merupakan sebuah Desa yang letaknya berada Di Ibu Kota dan termasuk Kawasan Agropolitas.

Desa Teratai memiliki batas-batas administrasi yang antara lain :

- *Sebelah utara berbatasan dengan Desa Bulangita*
- *Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Palopo*
- *Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Paguat*
- *Sebelah barat berbatasan dengan Desa Botubilotahu/Marisa Utara*

2). Letak dan Kondisi Geografis

a. Posisi Astronomis

Di Desa Teratai Tidak Memiliki Posisi Astronomis.

b. Posisi Geostrategis

Di Desa Teratai Tidak Memiliki Posisi Geostrategis.

c. Kondisi/kawasan :

- Pedalaman

Desa Teratai tidak memiliki daerah yang berkategori pedalaman

- Terpencil

Desa Teratai Tidak termasuk kategori terpencil,

d. Pesisir

Desa Teratai Tidak berada pada daerah pesisir pantai, dan bahkan Tidak berada di atas laut, dengan luas pemukiman penduduk.

e. Pegunungan

Desa Teratai memiliki daerah yang berkategori pegunungan

F . Kepulauan

Desa Teratai tidak berada di kepulauan.

3). Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi bahwa wilayah Desa Teratai memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti Pertambangan, perkebunan, pariwisata, industri rumah tangga, dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah. Penyajian data mengacu pada tabel berikut ini :

Tabel-3 Potensi Desa Teratai

No	Uraian	Desa	Dusun Dupi	Dusun Moduito	Dusun Hulangato	Dusun Bihe	Dusun Mekar Jaya
1	Potensi perikanan air tawar	Teratai	√	-	√	-	-
2	Potensi pariwisata	Teratai	√	√	√	-	√
3	Potensi Galian C	Teratai	√	√	-	-	-
4	Perkebunan	Teratai	√	√	√	√	√
5	Tanah Kas Milik Desa	Teratai	√	√	√	-	-
6	Pohon Kelapa Milik Desa	Teratai	√	-	-	-	-

➤ **Wilayah rawan bencana**

Berdasarkan deskripsi karakteristik, wilayah Desa Teratai yang berpotensi rawan bencana alam seperti Tsunami, abrasi, gempa,

➤ **Demografi**

Desa Teratai dalam data demografi analisis kependudukan berdasarkan kriteria pendidikan, Mata Pencarian, agama dan lain-lain

Tabel-4 Demografi Desa Teratai Tahun 2020

No	Uraian	Jumlah
1.	KEPENDUDUKAN	
	A. Jumlah Penduduk (Jiwa)	2.304
	B. Jumlah KK	620
	C, Jumlah Laki-laki	

	a. 0 – 15 tahun	246
	b. 16 – 55 tahun	798
	c. Diatas 55 Tahun	129
	D. Jumlah Perempuan	
	a. 0 – 15 tahun	237
	b. 16 – 55 tahun	784
	c. Diatas 55 Tahun	110
2.	TINGKAT PENDIDIKAN	
	A. Tidak Tamat SD	302
	B. SD	632
	C. SLTP	483
	D. SLTA	414
	E. Paket C.	2
	F. Diploma, S1,S2	111
3.	MATA PENCAHARIAN	
	A. Buruh	114
	B. Petani	320
	C. Pedagang	18
	D. Tukang Kayu	5
	E. Penjahit	5
	F. PNS	110
	G. TNI/POLRI	32
4.	AGAMA	
	A. Islam	2.294
	B. Kristen Protestan	1
	C. Kristen Katholik	2
	D. Hindu	4
	E. BUDHA	2

Dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Kependudukan.

Jumlah usia produktif Laki-laki lebih banyak dibanding dengan usia anak-anak dan lansia, maupun perempuan.

2. Tingkat Pendidikan

Masyarakat secara umum di Desa Teratai masih tergolong berpendidikan cukup Tinggi dimana jumlah lulusan SD, SLTP, SLTA dibandingkan dengan Sarjana.

3. Mata Pencapaian Mayoritas mata pencapaian penduduk adalah petani. Hal ini disebabkan karena sudah turun temurun sejak dulu bahwa masyarakat adalah petani dan juga minimnya tingkat pendidikan menyebabkan masyarakat tidak punya keahlian lain dan akhirnya tidak punya pilihan lain selain menjadi buruh tani dan petani.

4. Agama

Warga masyarakat Desa Teratai adalah terdiri atas masyarakat beragama, Kristen Protestan 1 Jiwa, Kristen Katholik 2 Jiwa, Hindu 4 Jiwa, Budha 2 Jiwa dan selebihnya adalah Muslim sebanyak 2.294 Jiwa.

4.1.2. Visi dan Misi Desa Teratai Kecamatan Marisa

Adapun visi dan misi desa teratai kecamatan marisa dapat di uraikan sebagai berikut :

1) Visi Desa Teratai

Visi desa teratai selaras dengan visi kabupaten pohuwato, yakni visinya adalah **“MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG MAJU, AMAN, CERDAS DAN SEHAT”**

Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah :

Terwujudnya Masyarakat maju : dimana masyarakat memiliki aneka ragam kelompok sosial atau lebih dikenal dengan kelompok organisasi kemasyarakatan yang

tumbuh dan berkembang berdasarkan kebutuhan serta tujuan tertentu yang akan dicapai.

Aman : Suatu kondisi kehidupan masyarakat bebas dari gangguan berbagai hal yang dapat merugikan masyarakat itu sendiri, sehingganya masyarakat dapat hidup tentram aman, damai tidak merasa takut dalam melakukan segala aktifitas dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari.

Cerdas dan Sehat : Satu kesatuan masyarakat berperilaku sehat atas kesadaran sendiri sehingga anggota keluarga atau keluarga tersebut dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan kemasyarakatan.

2) Misi desa Teratai

Misi Desa Teratai merupakan turunan dari Visi Desa Teratai. Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi Kepala Desa Teratai merupakan penjabaran lebih operasional dari Visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat

mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai Visi Kepala Desa Teratai.

Dalam meraih Visi Kepala Desa Teratai seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal. Maka disusunlah Misi Desa Teratai :

1. Memberdayakan potensi yang ada di masyarakat, meliputi :
 - a) Pemberdayaan SDM, terutama perempuan, karang taruna atau pemuda dan pemudi.
 - b) Pemberdayaan sumber daya alam.
 - c) Pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
2. Menciptakan kondisi masyarakat aman, tertib, rukun dalam kehidupan bermasyarakat dengan berpegang teguh pada prinsip – prinsip agama dan budaya yang ada.
3. Mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa, meliputi :
 - a) Pemerintah yang transparan, adil, cepat, tepat dan benar.
 - b) Pelaksanaan pembangunan desa yang berkesinambungan dan mengedepankan musyawarah dan gotong royong masyarakat.
 - c) Mengupayakan satu rumah tangga satu sarjana.
4. Menciptakan kondisi lingkungan desa yang sehat, meliputi :
 - a) Merencanakan atau mengawasi kebersihan lingkungan, mengelolah dan memanfaatkan sampah yang masih bisa digunakan.
 - b) Melaksanakan kerja bakti/gotong royong program kebersihan lingkungan semua warga.

- c) Program penghijauan yang bertujuan menjadikan lingkungan yang sejuk, bersih dan rapi.
- d) Menciptakan lingkungan bersih dan rapi sehingga nyaman dan menjauhkan dari sumber – sumber penyakit.
- e) Budaya hidup bersih dan sehat, melalui kerjasama semua warga menciptakan lingkungan dengan kebersihan yang terjaga.

4.1.3. Struktur Organisasi Desa Teratai Kecamatan Marisa

Adapun struktur pemerintah desa di uraikan dalam bentuk tabel di bawah ini :

Tabel-5
Struktur Pemerintahan Desa

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan	Pend.
1	<i>SIMSON HASAN, SH</i>	<i>KEPALA DESA</i>	<i>2020 – 2026</i>	<i>S 1</i>
2	<i>ALWIN SULEMAN, SE</i>	<i>SEKRETARIS DESA</i>	<i>2020 s/d sekarang</i>	<i>S 1</i>
3	<i>HARIYATI HIONU, S.IP</i>	<i>KAUR KEUANGAN</i>	<i>2020 s/d sekarang</i>	<i>S 1</i>
4	<i>HAJIRA KADIR, S.P</i>	<i>KAUR PERENCANAAN</i>	<i>2020 s/d sekarang</i>	<i>S 1</i>
5	<i>SUSANTI MANGGAS</i>	<i>KAUR TATA USAHA DAN UMUM</i>	<i>2020 s/d sekarang</i>	<i>S 1</i>
6	<i>FITRIYANTI DIANGE, S.IP</i>	<i>KASIE PEMERINTAHAN</i>	<i>2020 s/d sekarang</i>	<i>S 1</i>
7	<i>MARTEN HAMZAH</i>	<i>KASIE KESEJAHTERAAN</i>	<i>2020 s/d sekarang</i>	<i>SLTA</i>
8	<i>RESTA RAHMAN, S.Pd</i>	<i>KASIE PELAYANAN</i>	<i>2020 s/d sekarang</i>	<i>S 1</i>
9	<i>NIZAM TINO</i>	<i>KAWIL MODUITO</i>	<i>2020 s/d sekarang</i>	<i>S 1</i>
10	<i>ADRIYANTO DIANGE</i>	<i>KAWIL BIHE</i>	<i>2020 s/d sekarang</i>	<i>SLTA</i>
11	<i>ABD. RAHMAN MUSA, S.IP</i>	<i>KAWIL DUPI</i>	<i>2020 s/d sekarang</i>	<i>S 1</i>
12	<i>GUSLAN KADIR, S.IP</i>	<i>KAWIL HULANGATO</i>	<i>2020 s/d sekarang</i>	<i>SLTA</i>
13	<i>JEN DEYALA, SE</i>	<i>KAWIL MEKAR JAYA</i>	<i>2020 s/d sekarang</i>	<i>S 1</i>
14	<i>NURLENA BAKARI</i>	<i>Operator Keuangan</i>	<i>2020 s/d sekarang</i>	<i>S 1</i>
15	<i>ESTIN RUPU</i>	<i>Operator Profil</i>	<i>2020 s/d sekarang</i>	<i>S MK</i>
16	<i>FITRIYANTI ALIM</i>	<i>Operator BDT</i>	<i>2020 s/d sekarang</i>	<i>S 1</i>

4.1.4. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Desa Teratai

Tugas dan Fungsi Pemerintahan Desa sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, sebagai berikut :

a. Kepala Desa

1. Tugas kepala desa adalah sebagai berikut :

- Menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)
- Menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)
- Mensosialisasikan RKP Desa, APB Desa dan rencana kerja kepada masyarakat

2. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa mempunyai Wewenang :

- Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
- Mengajukan rancangan Peraturan Desa.
- Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
- Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
- Membina kehidupan masyarakat desa
- Membina perekonomian desa
- Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;

- Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hokum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan
3. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud, Kepala Desa mempunyai Kewajiban :
- Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - Memelihara ketentraman dan keterlibatan masyarakat;
 - Melaksanakan kehidupan demokrasi;
 - Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa
 - Menaati dan menegakan seluruh peraturan perundang-undangan;
 - Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik
 - Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
 - Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
 - Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa

- Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
- Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
- Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; serta
- Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup

b. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa mempunyai tugas mengkoordinir dan menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan keuangan desa serta memberikan pelayanan administrasi bagi pemerintah desa dan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretaris Desa mempunyai fungsi :

- Pelaksana urusan surat-menyurat, kearsipan dan laporan
- Pelaksana urusan administrasi keuangan;
- Pelaksana administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; serta
- Pelaksana tugas dan fungsi kepala desa apabila kepala desa berhalangan.

c. Kepala Urusan Umum

Tugas kepala urusan umum, sebagai berikut :

- Membantu kepala desa di bidang teknis dan administratif pembinaan kehidupan masyarakat desa;
- Melaksanakan urusan surat menyurat serta pelayanan umum;
- Memelihara dan melestarikan asset-aset pemerintah;

- Melaksanakan urusan keuangan dan pelaporan
- Membina dan melayani administrasi kependudukan; dan
- Membina dan melayani perizinan.

d. Kepala Urusan Perencanaan

Tugas kepala Perencanaan, sebagai berikut :

- Membantu Sekretaris desa dalam urusan perencanaan ;
- Mengkoordinasikan urusan perencanaan Pembangunan Desa seperti menyiapkan bahan penyusunan RPJMDesa, RKPDesa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Menginventarisir data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring evaluasi program serta penyusunan berupa LPPD, IPPD, LKPJ Kepala Desa, Pengendalian pelaksanaan pembangunan desa serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

e. Bendahara Desa

Bendahara desa adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa. Bendahara desa merupakan bagian dari PPKD. PPKD atau Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa merupakan unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Bendahara di jabat oleh staf pada Urusan Keuangan.

Bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan

pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

f. Kepala Seksi Pemerintahan

Tugas kepala urusan pemerintahan, sebagai berikut :

- Membantu kepala desa di bidang teknis dan administratif pelaksanaan pemerintahan desa.
- Membantu sekretaris desa di bidang teknis dan administratif pelaksanaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- Mengajukan pertimbangan kepada Kepala Desa baik menyangkut rancangan Peraturan Desa maupun hal-hal yang bertalian dengan pemerintahan desa;
- Mengajukan pertimbangan kepada kepala desa menyangkut urusan perselisihan masyarakat; dan
- Menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap tahun

g. Kepala Seksi Kesejahteraan

Tugas kepala Seksi Kesejahteraan sebagai berikut :

- Membantu Kepala Desa di bidang teknis dan administratif pelaksanaan pengelolaan pembangunan masyarakat desa

- Membantu membina perekonomian desa
- Mengajukan pertimbangan kepada kepala desa baik menyangkut rancangan peraturan desa maupun hal-hal yang bertalian dengan pembangunan desa;
- Penggalan dan pemanfaatan potensi desa.

h. Kepala Seksi Pelayanan

Tugas kepala Seksi Pelayanan sebagai berikut :

- Membantu Kepala Desa di bidang teknis dan administratif pelaksanaan pengelolaan pembangunan masyarakat desa
- membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan.
- Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
- Menyiapkan administrasi dalam pelayanan kepada masyarakat
- Mencatat dan melaporkan hasil pelayanan administrasi;
- Mengelola arsip dan dokumen administrasi pelayanan;
- Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai budaya masyarakat, keagamaan dan ketenaga kerjaan;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

i. Kepala Dusun

Kepala dusun mempunyai tugas menjalankan kebijakan dan kegiatan kepala desa bidang pemerintahan, bidang ketentraman dan ketertiban, bidang pembangunan dan bidang kemasyarakatan di wilayah kerjanya.

Kepala dusun mempunyai fungsi:

- pelaksana kegiatan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, bidang pembangunan dan bidang kemasyarakatan di wilayah kerjanya;
- pelaksana peraturan desa di wilayah kerjanya; dan
- pelaksana kebijakan kepala desa

4.2. Interpretasi Data Hasil Penelitian

4.2.1. Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Uji validitas dan reliabilitas terhadap kuesioner atau instrumen penelitian dimaksudkan untuk menguji kelayakan secara psikometri suatu kuesioner. Kuesioner yang valid dan reliabel akan menjamin data yang diperoleh tidak mengalami bias yang berarti.

Uji validitas dilakukan terhadap masing-masing item pernyataan dalam kuesioner. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode korelasi *product moment* antara skor item dengan skor total (skor instrument). Jika suatu item memiliki korelasi item-total signifikan ($r_{yx} > r$ tabel), maka item pernyataan tersebut valid. Dalam uji validitas ini digunakan responden sebanyak 38 orang, sehingga pada tingkat signifikansi 5% dari tabel r diperoleh nilai r tabel = 0,320.

Uji reliabilitas terhadap kuesioner penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *Cronbach's Alpha*. Menurut Arikunto (2002:171) "Suatu instrumen dikatakan reliabel/handal apabila nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar atau sama dengan 0,5, maka kuesioner tersebut dinyatakan reliabel.

Hasil uji validitas dan reliabilitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel-6 : Hasil Uji Validitas X1

Variabel	Indikator	R_Hitung	Ket
Transparansi (X1)	Item 1	0.449	Valid
	Item 2	0.606	Valid
	Item 3	0.442	Valid
	Item 4	0.404	Valid
	Item 5	0.719	Valid
	Item 6	0.491	Valid
	Item 7	0.549	Valid
	Item 8	0.484	Valid
	Item 9	0.489	Valid
	Item 10	0.437	Valid
	Item 11	0.570	Valid
	Item 12	0.404	Valid
Variabel	Indikator	R_Hitung	Ket
Akuntabilitas (X2)	Item 1	0.473	Valid
	Item 2	0.458	Valid
	Item 3	0.472	Valid
	Item 4	0.466	Valid
	Item 5	0.482	Valid
	Item 6	0.407	Valid
	Item 7	0.566	Valid
	Item 8	0.525	Valid
	Item 9	0.502	Valid
	Item 10	0.543	Valid
Variabel	Indikator	R_Hitung	Ket
Alokasi Dana Desa (Y)	Item 1	0.581	Valid
	Item 2	0.437	Valid
	Item 3	0.572	Valid
	Item 4	0.515	Valid
	Item 5	0.457	Valid

Sumber : Lampiran Olah Data SPSS 2021

Tabel-7 : Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Alpha Cronbach	Keterangan
Transparansi (X1)	0.580	Reliabel
Akuntabilitas (X2)	0.582	Reliabel
Alokasi Dana Desa (Y)	0.634	Reliabel

Sumber : Lampiran Olah Data SPSS 2021

Berdasarkan tabel hasil uji validitas dan reliabilitas yang disajikan di atas terlihat bahwa masing-masing item pernyataan dalam kuesioner variabel-variabel bebas dan variabel terikat memiliki nilai korelasi item-total atau koefisien validitas lebih besar dari 0,320. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, masing-masing item pernyataan dalam kuesioner tersebut valid. Demikian pula, hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa kuesioner ini memiliki koefisien reliabilitas *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0.5. Oleh karena nilai tersebut lebih besar dari 0,5, maka disimpulkan bahwa kuesioner variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini reliabel.

Kesimpulan dari hasil uji validitas dan reliabilitas terhadap variabel-variabel penelitian adalah kuesioner penelitian ini secara psikometrik layak digunakan sebagai alat/instrumen pengumpul data.

4.2.2. Analisis Deskriptif Hasil Penelitian

Penelitian ini akan melihat seberapa besar pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Teratai Kecamatan Marisa. Masing-masing indikator dari setiap variabel akan dilakukan pendeskripsian. Langkah awal untuk mendeskripsikan setiap indikator adalah membuat tabel kategori atau skala penilaian untuk masing-masing item pertanyaan. Perhitungan mengenai skala penilaian ini searah dengan pendapat yang dikemukakan Riduwan (2003:15) bahwa perhitungan skor tiap komponen yang diteliti adalah dengan mengalikan seluruh frekuensi data dengan nilai bobotnya. Selanjutnya dapat dibuatkan skala penilaian untuk masing-masing item

pertanyaan dengan terlebih dahulu menghitung rentang skalanya. Adapun hasil perhitungannya, yaitu :

$$\text{Bobot terendah} \times \text{item} \times \text{jumlah responden} = 1 \times 1 \times 38 = 38$$

$$\text{Bobot tertinggi} \times \text{item} \times \text{jumlah responden} = 5 \times 1 \times 38 = 190$$

$$\text{Rentang skala : } \frac{190 - 38}{5} = 30.4 (30)$$

Berdasarkan hasil perhitungan rentang skala tersebut, maka dapat dibuatkan skala penilaian seperti pada tabel 8 berikut ini :

Tabel-8 : Skala Penilaian Jawaban Responden

Range	Kategori
160 - 190	Sangat tinggi
129 - 159	Tinggi
98 - 128	Sedang
67 - 97	Rendah
36 - 66	Sangat Rendah

Sumber : Data Olahan 2021

Adapun deskripsi jawaban responden terhadap masing-masing pertanyaan pada masing-masing indikator diuraikan berikut ini :

4.2.2.1. Analisis Deskriptif Variabel Transparansi (X1)

Berdasarkan hasil tabulasi data diperoleh nilai masing-masing indikator dari variabel Transparansi (X1) menurut tinjauan responden berdasarkan tabel 9 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel-9: Nilai (Skor) Transparansi (X1)

Bobot	Item 1			Item 2			Item 3		
	F	Skor	%	F	Skor	%	F	Skor	%
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	23	92	60.5	13	52	34.2	11	44	28.9
3	13	39	34.2	21	63	55.3	27	81	71.1

2	2	4	5.3	4	8	10.5	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	38	135	100	38	123	100	38	125	100

Bobot	Item 4			Item 5			Item 6		
	F	Skor	%	F	Skor	%	F	Skor	%
5	0	0	0	4	20	10.5	0	0	0
4	12	48	31.6	15	60	39.5	10	40	26.3
3	18	54	47.4	13	39	34.2	19	57	50.0
2	8	16	21.1	6	12	15.8	9	18	23.7
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	38	118	100	38	131	100	38	115	100

Bobot	Item 7			Item 8			Item 9		
	F	Skor	%	F	Skor	%	F	Skor	%
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	12	48	31.6	2	8	5.3	5	20	13.2
3	16	48	42.1	21	63	55.3	18	54	47.4
2	10	20	2.63	15	30	39.5	15	30	39.5
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	38	116	100	38	101	100	38	104	100

Bobot	Item 10			Item 11			Item 12		
	F	Skor	%	F	Skor	%	F	Skor	%
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	8	32	21.1	8	32	21.1
3	11	33	28.9	17	51	44.7	23	69	60.5
2	27	54	71.1	13	23	34.2	7	14	18.4
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	38	87	100	38	109	100	38	115	100

Sumber : Data olahan Kuesioner 2021

Item 1 dari tanggapan responden tentang pernyataan “Adanya aturan perundang-undangan yang mengatur khusus persoalan transparansi pengelolaan ADD”. Tanggapan responden mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 23 orang dengan skor 92 memberikan jawaban Setuju, 13 orang dengan skor 39 menjawab Ragu-Ragu, dan 2 orang dengan skor 4 menjawab Tidak Setuju. Ini berarti bahwa terdapat aturan perundang-undangan yang mengatur khusus

persoalan transparansi pengelolaan ADD di Desa Teratai Kecamatan Marisa, dengan skor total adalah 135 termasuk kategori tinggi.

Item 2 dari tanggapan responden tentang pernyataan “Adanya kerangka kerja hukum yang memberi defenisi yang jelas tentang peran dan tanggungjawab bagi semua aspek berkaitan dengan transparansi pengelolaan ADD”. Tanggapan responden mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 13 orang dengan skor 52 memberikan jawaban Setuju, 21 orang dengan skor 63 menjawab Ragu-Ragu, dan 4 orang dengan skor 8 menjawab Tidak Setuju. Hal ini menunjukan bahwa belum nampak kerangka kerja hukum yang memberi defenisi yang jelas tentang peran dan tanggungjawab bagi semua aspek berkaitan dengan transparansi pengelolaan ADD di Desa Teratai, dengan skor total adalah 123 termasuk kategori sedang.

Item 3 dari tanggapan responden tentang pernyataan “Adanya pertanggungjawaban pengelolaan ADD”. Tanggapan responden mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 11 orang dengan skor 44 memberikan jawaban Setuju, 27 orang dengan skor 81 menjawab Ragu-Ragu. Hal ini menunjukan bahwa sebagian besar masyarakat tidak mengetahui adanya pertanggungjawaban pengelolaan ADD di Desa Teratai, dengan skor total adalah 125 termasuk kategori sedang.

Item 4 dari tanggapan responden tentang pernyataan “Adanya pembagian peran dan tanggungjawab yang jelas dari masing-masing tingkat pemerintahan terkait pengelolaan ADD”. Tanggapan responden mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 12 orang dengan skor 48 memberikan jawaban Setuju, 18

orang dengan skor 54 menjawab Ragu-Ragu, dan 8 orang dengan skor 16 menjawab tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden tidak mengetahui dan memahami tentang adanya pembagian peran dan tanggungjawab yang jelas dari masing-masing tingkat pemerintahan terkait pengelolaan ADD, dengan skor total adalah 118 termasuk kategori Sedang.

Item 5 dari tanggapan responden tentang pernyataan “Adanya keterbukaan pengelolaan alokasi dana desa kepada masyarakat desa teratai dalam rangka kerja anggaran (proses penganggaran)”. Tanggapan responden mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 4 orang dengan skor 20 memberikan jawaban sangat setuju, 15 orang dengan skor 60 menjawab setuju, dan 13 orang dengan skor 39 menjawab ragu-ragu sedangkan sebanyak 6 orang dengan skor 12 menjawab Tidak Setuju. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa teratai sudah melakukan keterbukaan kepada publik mengenai pengelolaan alokasi dana, namun belum sepenuhnya, dengan skor total adalah 131 termasuk kategori tinggi.

Item 6 dari tanggapan responden tentang pernyataan “Adanya publikasi yang dilakukan pemerintah desa teratai berkaitan dengan hasil laporan anggaran (yang telah diaudit oleh lembaga yang berwenang) tentang pengelolaan alokasi dana desa”. Tanggapan responden mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 10 orang dengan skor 40 memberikan jawaban Setuju, 19 orang dengan skor 57 menjawab Ragu-Ragu, dan sebanyak 9 orang dengan skor 18 menjawab Tidak Setuju. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa teratai belum maksimal dalam melakukan publikasi berkaitan dengan hasil laporan anggaran (yang telah diaudit

oleh lembaga yang berwenang) tentang pengelolaan alokasi dana desa, dengan skor total adalah 115 termasuk kategori sedang.

Item 7 dari tanggapan responden tentang pernyataan “Adanya dokumentasi anggaran pemerintah desa teratai sebagai bukti transparansi anggaran alokasi dana desa”. Tanggapan responden mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 12 orang dengan skor 48 memberikan jawaban Setuju, sebanyak 16 orang dengan skor 48 menjawab Ragu-Ragu, dan sebanyak 10 orang dengan skor 20 menjawab Tidak Setuju. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa teratai sudah memiliki dokumentasi anggaran sebagai bukti transparansi alokasi dana desa, dengan skor total adalah 116 termasuk kategori sedang.

Item 8 dari tanggapan responden tentang pernyataan “Adanya keterbukaan informasi berkaitan dengan pengelolaan alokasi dana desa di desa teratai”. Tanggapan responden mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 2 orang dengan skor 8 memberikan jawaban Setuju, sebanyak 21 orang dengan skor 63 menjawab Ragu-Ragu, dan sebanyak 15 orang dengan skor 30 menjawab Tidak Setuju. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa teratai belum ada keterbukaan mengenai informasi berkaitan dengan pengelolaan alokasi dana desa, dengan skor total adalah 101 termasuk kategori sedang.

Item 9 dari tanggapan responden tentang pernyataan “Adanya lembaga audit yang independen dan efektif dalam pengelolaan ADD di desa teratai”. Tanggapan responden mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 8 orang dengan skor 32 memberikan jawaban Setuju, sebanyak 23 orang dengan skor 69 menjawab Ragu-Ragu, dan sebanyak 7 orang dengan skor 14 menjawab Tidak

Setuju. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat tidak mengetahui adanya lembaga audit independen dan efektif dalam pengelolaan ADD di Desa teratai, dengan skor total adalah 104 termasuk kategori sedang.

Item 10 dari tanggapan responden tentang pernyataan “Adanya data yang akurat dan terpercaya berkaitan dengan pengelolaan alokasi dana desa di desa teratai”. Tanggapan responden mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 11 orang dengan skor 33 memberikan jawaban Ragu-Ragu, dan sebanyak 27 orang dengan skor 54 menjawab Tidak Setuju. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa teratai tidak memiliki data akurat dan terpercaya berkaitan dengan pengelolaan alokasi dana desa, dengan skor total adalah 87 termasuk kategori rendah.

Item 11 dari tanggapan responden tentang pernyataan “Adanya keterbukaan informasi kepada masyarakat selama proses penyusunan anggaran alokasi dana desa”. Tanggapan responden mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 8 orang dengan skor 32 memberikan jawaban Setuju, sebanyak 17 orang dengan skor 51 menjawab Ragu-Ragu, dan sebanyak 13 orang dengan skor 23 menjawab Tidak Setuju. Hal ini menunjukkan bahwa informasi kepada masyarakat berkaitan dengan keterbukaan informasi dalam proses penyusunan anggaran ADD belum efektif yang dilakukan oleh pemerintah desa teratai, dengan skor total adalah 109 termasuk kategori sedang.’

Item 12 dari tanggapan responden tentang pernyataan “Adanya kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses penganggaran Alokasi Dana Desa”. Tanggapan responden mengenai indikator ini menunjukkan

sebanyak 8 orang dengan skor 32 memberikan jawaban Setuju, sebanyak 23 orang dengan skor 69 menjawab Ragu-Ragu, dan sebanyak 7 orang dengan skor 14 menjawab Tidak Setuju. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat desa teratai jarang diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses penganggaran alokasi dana desa., dengan skor total adalah 115 termasuk kategori sedang.

4.2.2.2. Analisis Deskriptif Variabel Akuntabilitas (X2)

Berdasarkan hasil tabulasi data diperoleh nilai masing-masing indikator dari variabel Akuntabilitas (X2) menurut tinjauan responden berdasarkan tabel 10 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel-10: Nilai (Skor) Akuntabilitas (X1)

Bobot	Item 1			Item 2			Item 3			Item 4		
	F	Skor	%	F	Skor	%	F	Skor	%	F	Skor	%
5	12	60	31.6	15	75	39.5	9	45	23.7	7	35	18.4
4	26	104	68.4	23	92	60.5	21	84	55.3	31	124	81.6
3	0	0	0	0	0	0	8	24	21.1	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	38	164	100	38	167	100	38	153	100	38	159	100

Bobot	Item 5			Item 6			Item 7		
	F	Skor	%	F	Skor	%	F	Skor	%
5	9	45	23.7	12	60	31.6	3	15	7.9
4	29	116	76.3	26	104	68.4	22	88	57.9
3	0	0	0	0	0	0	13	39	34.2
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	38	161	100	38	164	100	38	142	100

Bobot	Item 8			Item 9			Item 10		
	F	Skor	%	F	Skor	%	F	Skor	%
5	16	80	42.1	6	30	15.8	10	50	26.3
4	20	80	52.6	32	128	84.2	28	112	73.7
3	2	6	5.3	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	38	166	100	38	158	100	38	162	100

Sumber : Data olahan Kuesioner 2021

Item 1 dari tanggapan responden tentang pernyataan “Penatausahaan alokasi dana desa di desa teratai dilakukan oleh Bendahara Desa”. Tanggapan responden mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 12 orang dengan skor 60 memberikan jawaban Sangat Setuju, dan sebanyak 26 orang dengan skor 104 menjawab Setuju. Hal ini menunjukkan bahwa penatausahaan alokasi dana desa di desa teratai merupakan tanggung jawab bendahara desa, dengan skor total adalah 164 termasuk kategori Sangat Tinggi.

Item 2 dari tanggapan responden tentang pernyataan “Bendahara Desa teratai wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib berkaitan dengan ADD”. Tanggapan responden mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 15 orang dengan skor 75 memberikan jawaban Sangat Setuju, dan sebanyak 23 orang dengan skor 92 menjawab Setuju. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab bendahara adalah melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran alokasi dana desa di desa teratai. Dengan skor total adalah 167 termasuk kategori Sangat Tinggi.

Item 3 dari tanggapan responden tentang pernyataan “Bendahara Desa teratai wajib mempertanggung jawabkan Alokasi Dana Desa melalui laporan pertanggungjawaban”. Tanggapan responden mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 9 orang dengan skor 45 memberikan jawaban Sangat Setuju, sebanyak 21 orang dengan skor 84 memberikan jawaban Setuju, dan sebanyak 8 orang dengan skor 24 menjawab Ragu-Ragu. Hal ini menunjukkan

bahwa laporan pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa di lakukan oleh bendahara. Dengan skor total adalah 167 termasuk kategori Sangat Tinggi.

Item 4 dari tanggapan responden tentang pernyataan “Laporan Pertanggungjawaban ADD di desa teratai disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya”. Tanggapan responden mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 7 orang dengan skor 35 memberikan jawaban Sangat Setuju, dan sebanyak 31 orang dengan skor 124 memberikan jawaban Setuju. Hal ini menunjukan bahwa laporan pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa di lakukan oleh kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Dengan skor total adalah 159 termasuk kategori Tinggi.

Item 5 dari tanggapan responden tentang pernyataan “Kepala Desa Teratai menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan pengelolaan ADD kepada Bupati berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun”. Tanggapan responden mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 9 orang dengan skor 45 memberikan jawaban Sangat Setuju, dan sebanyak 29 orang dengan skor 116 memberikan jawaban Setuju. Hal ini menunjukan bahwa Kepala Desa Teratai selalu menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan pengelolaan ADD kepada Bupati berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. Dengan skor total adalah 161 termasuk kategori Tinggi.

Item 6 dari tanggapan responden tentang pernyataan “Laporan semester pertama berupa laporan realisasi pengelolaan ADD”. Tanggapan responden mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 12 orang dengan skor 60

memberikan jawaban Sangat Setuju, dan sebanyak 26 orang dengan skor 104 memberikan jawaban Setuju. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa teratai selalu menyampaikan Laporan semester pertama berupa laporan realisasi pengelolaan ADD. Dengan skor total adalah 164 termasuk kategori Tinggi.

Item 7 dari tanggapan responden tentang pernyataan “Laporan realisasi pelaksanaan ADD semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan”. Tanggapan responden mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 3 orang dengan skor 15 memberikan jawaban Sangat Setuju, sebanyak 22 orang dengan skor 88 memberikan jawaban Setuju, dan sebanyak 13 orang dengan skor 39 memberikan jawaban Ragu-Ragu. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa teratai selalu Laporan realisasi pelaksanaan ADD semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Dengan skor total adalah 142 termasuk kategori Tinggi.

Item 8 dari tanggapan responden tentang pernyataan “Kepala Desa Teratai menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan pengelolaan ADD kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran”. Tanggapan responden mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 16 orang dengan skor 80 memberikan jawaban Sangat Setuju, sebanyak 20 orang dengan skor 80 memberikan jawaban Setuju, dan sebanyak 2 orang dengan skor 6 memberikan jawaban Ragu-Ragu. Hal ini menunjukkan bahwa kepala desa teratai selalu menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan pengelolaan ADD kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran. Dengan skor total adalah 166 termasuk kategori Sangat Tinggi.

Item 9 dari tanggapan responden tentang pernyataan “Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Pengelolaan ADD terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan”. Tanggapan responden mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 6 orang dengan skor 30 memberikan jawaban Sangat Setuju, dan sebanyak 32 orang dengan skor 128 memberikan jawaban Setuju. Hal ini menunjukkan bahwa Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Pengelolaan ADD yang dilakukan oleh pemerintah desa teratai terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Dengan skor total adalah 158 termasuk kategori Tinggi.

Item 10 dari tanggapan responden tentang pernyataan “Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD ditetapkan dengan Peraturan Desa”. Tanggapan responden mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 10 orang dengan skor 50 memberikan jawaban Sangat Setuju, dan sebanyak 28 orang dengan skor 112 memberikan jawaban Setuju. Hal ini menunjukkan bahwa Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD oleh pemerintah desa teratai ditetapkan dengan Peraturan Desa. Dengan skor total adalah 1628 termasuk kategori Sangat Tinggi.

4.2.2.3. Analisis Deskriptif Variabel Alokasi Dana Desa (Y)

Berdasarkan hasil tabulasi data diperoleh nilai masing-masing indikator dari variabel Alokasi Dana Desa (Y) menurut tinjauan responden berdasarkan tabel 11 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel-11: Nilai (Skor) Alokasi Dana Desa (Y)

Bobot	Item 1			Item 2			Item 3			Item 4			Item 5		
	F	Skor	%	F	Skor	%	F	Skor	%	F	Skor	%	F	Skor	%
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	5	20	13.2	2	8	5.3	2	8	5.3	0	0	0	8	32	21.1
3	22	66	57.9	23	69	60.5	14	42	36.8	20	60	52.6	19	57	50.0
2	11	22	28.9	13	26	34.2	22	44	57.9	18	36	47.4	11	22	28.9
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	38	108	100	38	103	100	38	94	100	38	96	100	38	111	100

Sumber : Data olahan Kuesioner 2021

Item 1 dari tanggapan responden tentang pernyataan “Alokasi dana desa di desa teratai di gunakan untuk peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar”. Tanggapan responden mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 5 orang dengan skor 20 memberikan jawaban Setuju, sebanyak 22 orang dengan skor 66 menjawab Ragu-Ragu, dan sebanyak 11 dengan skor 22 memberikan jawaban Tidak Setuju. Hal ini menunjukan bahwa sebagian responden meragukan Alokasi dana desa di desa teratai di gunakan untuk peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar. Dengan skor total adalah 108 termasuk kategori sedang.

Item 2 dari tanggapan responden tentang pernyataan “Alokasi dana desa di desa teratai di gunakan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia”. Tanggapan responden mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 2 orang dengan skor 8 memberikan jawaban Setuju, sebanyak 23 orang dengan skor 69 menjawab Ragu-ragu, dan sebanyak 13 dengan skor 26 memberikan jawaban Tidak Setuju. Hal ini menunjukan sebagian responden meragukan bahwa Alokasi dana desa di desa teratai di gunakan untuk pembangunan dan pemeliharaan

infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia, dengan skor total adalah 103 termasuk kategori sedang.

Item 3 dari tanggapan responden tentang pernyataan “Alokasi dana desa di desa teratai di gunakan untuk pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif”. Tanggapan responden mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 2 orang dengan skor 8 memberikan jawaban benar, sebanyak 14 orang dengan skor 42 menjawab cukup benar, dan sebanyak 22 dengan skor 44 memberikan jawaban kadang-kadang. Hal ini menunjukan sebagian responden meragukan bahwa Alokasi dana desa di desa teratai di gunakan untuk pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif , dengan skor total adalah 94 termasuk kategori rendah.

Item 4 dari tanggapan responden tentang pernyataan “Alokasi dana desa di desa teratai di gunakan untuk pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi”. Tanggapan responden mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 20 orang dengan skor 60 menjawab cukup benar, dan sebanyak 18 dengan skor 36 memberikan jawaban kadang-kadang. Hal ini menunjukan sebagian responden meragukan bahwa Alokasi dana desa di desa teratai di gunakan untuk pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi, dengan skor total adalah 94 termasuk kategori rendah.

Item 5 dari tanggapan responden tentang pernyataan “Alokasi dana desa di desa teratai di gunakan untuk peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa”. Tanggapan responden mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 8 orang dengan skor 32

memberikan jawaban benar, sebanyak 19 orang dengan skor 57 menjawab cukup benar, dan sebanyak 11 dengan skor 22 memberikan jawaban kadang-kadang. Hal ini menunjukkan sebagian responden meragukan tentang Alokasi dana desa di desa teratai di gunakan untuk peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa, dengan skor total adalah 111 termasuk kategori sedang.

4.2.3. Analisis Regresi Berganda

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh pada obyek penelitian, selanjutnya data tersebut diolah dengan bantuan program SPSS versi 24 dan dihimpun dalam tabel yang memuat variabel-variabel yaitu Transparansi (X1) dan Akuntabilitas (X2) dan hasilnya dapat dilihat pada tabel 12 di bawah ini :

Tabel-12 Rangkuman Hasil Analisis Regresi Berganda

Variabel	Koefisien Regresi (B)	Beta	T-Hitung	Sig.	Ket
Konstata	12.419		4.823	0,077	Signifikan
Transparansi (X1)	0,216	0,292	2,801	0,080	Signifikan
Akuntabilitas (X2)	0,277	0,307	3.274	0,011	Signifikan
R = 0,527 F_tabel = 3.240 F_hitung = 2.089					
R. Square = 0,607 T_tabel = 2,711					

Olah Data SPSS 2021 (Lampiran)

Berdasarkan hasil perhitungan regresi seperti terlihat tabel-11. tersebut di atas, maka dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 12.419 + 0,216X_1 + 0,277X_2$$

Dari hasil persamaan tersebut di atas menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar 12.419 menyatakan bahwa jika variabel Transparansi dan Akuntabilitas dianggap konstan, maka pengelolaan alokasi dana desa di desa teratai kecamatan

marisa adalah sebesar 12.419. Sedangkan nilai koefisien regresi masing-masing variabel bebas yang diteliti jika meningkat satu satuan, maka pengelolaan alokasi dana desa akan meningkat sebesar nilai koefisien variabel-variabel bebas tersebut.

Koefisien Transparansi (X1) sebesar 0,216 menyatakan bahwa setiap peningkatan 1 persen Transparansi, maka pengelolaan alokasi dana desa (Y) akan meningkat sebesar 0,216 atau 21.6 persen.

Koefisien regresi Akuntabilitas (X2) sebesar 0,277 menyatakan bahwa setiap peningkatan 1 persen Akuntabilitas, maka pengelolaan alokasi dana desa (Y) akan meningkat sebesar 0,277 atau 27.2 persen.

4.2.4. Analisis Koefisien Korelasi

Berdasarkan tabel 11 di atas, terlihat bahwa koefisien korelasi (R) yaitu sebesar 0,527 yang berarti bahwa hubungan antara variabel-variabel bebas dengan variabel terikat bisa dikategorikan memiliki hubungan yang sangat kuat. Sedangkan angka R Square adalah koefisien determinasi yaitu 0,607 yang menunjukkan bahwa 60.7% variasi variabel pengelolaan alokasi dana desa (Y) dapat dijelaskan oleh variabel bebas Transparansi (X1) dan Akuntabilitas (X2), sedangkan sisanya sebesar 39.3% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

4.2.5. Uji Hipotesis

Uji t dipergunakan untuk menguji signifikansi variabel-variabel bebas secara parsial atau sendiri-sendiri. Cara yang digunakan adalah dengan membandingkan antara statistik t_{hitung} dengan statistik t_{tabel} atau melihat angka

probabilitas (sig.) dengan α 0,05, dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

- Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau angka probabilitas (sig.) $> 0,05$ maka H_0 diterima atau tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel bebas Transparansi dan akuntabilitas terhadap variabel terikat Pengelolaan Alokasi Dana Desa.
- Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ angka probabilitas (sig.) $< 0,05$ maka H_0 ditolak atau terdapat hubungan yang signifikan antara variabel Transparansi dan akuntabilitas terhadap variabel terikat Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Nilai t hitung variabel Transparansi (X1) sebesar 2.801 ($2.801 > 2,711$) dengan tingkat signifikansi 0,080 ($p < 0,05$). Hal ini menunjukkan ada pengaruh positif dan signifikan antara variabel Transparansi (X1) terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y).

Nilai t hitung variabel Akuntabilitas (X2) sebesar 3,274 ($3,274 > 2,711$) dengan tingkat signifikansi 0,11 ($p < 0,05$). Hal ini menunjukkan ada pengaruh positif dan signifikan antara variabel Akuntabilitas (X2) terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y).

Berdasarkan uji t tersebut di atas disimpulkan bahwa variabel yang berpengaruh paling dominan terhadap variabel Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y) adalah variabel Akuntabilitas (X2), hal ini dibuktikan dengan hasil nilai t hitung 3.274 yang tertinggi dan angka signifikansi 0,11 yang terkecil diantara variabel bebas lainnya.

4.3. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas menunjukkan bahwa semua variabel bebas yang telah diteliti yakni Transparansi (X1) dan Akuntabilitas (X2) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Teratai Kecamatan Marisa, dan secara parsial kedua variabel bebas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Teratai Kecamatan Marisa.

Hasil penelitian pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Teratai Kecamatan Marisa menunjukkan bahwa : Nilai konstanta sebesar 12.419 menyatakan bahwa jika variabel Transparansi dan Akuntabilitas dianggap konstan, maka Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Teratai Kecamatan Marisa sebesar 12.419. Sedangkan nilai koefisien regresi masing-masing variabel bebas yang diteliti jika meningkat satu satuan, maka Pengelolaan Alokasi Dana Desa akan meningkat sebesar nilai koefisien variabel-variabel bebas tersebut.

Koefisien Transparansi (X1) sebesar 0,216 menyatakan bahwa setiap peningkatan 1 persen Transparansi, maka pengelolaan alokasi dana desa (Y) akan meningkat sebesar 0,216 atau 21.6 persen. Koefisien regresi Akuntabilitas (X2) sebesar 0,277 menyatakan bahwa setiap peningkatan 1 persen Akuntabilitas, maka pengelolaan alokasi dana desa (Y) akan meningkat sebesar 0,277 atau 27.2 persen.

Menurut Mardiasmo (2009:52), transparansi berarti keterbukaan pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Transparansi informasi

terutama informasi keuangan dan fisik harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami. Transparansi dapat dilakukan apabila ada kejelasan tugas kewenangan, ketersediaan informasi kepada publik, proses penganggaran yang terbuka, dan jaminan integritas dari pihak independen mengenai prakiraan fisik, informasi, dan penjabarannya.

Standar Akuntansi Pemerintah menjelaskan bahwa transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandate dari rakyat. Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan demikian transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi.

Jadi transparansi adalah merupakan sebuah prinsip yang wajib dilakukan oleh pemerintah atau manajemen pemerintahan sebagai bentuk keterbukaan berupa keterbukaan informasi, keuangan dan lain sebagainya kepada publik dengan tujuan untuk menyampaikan kepada khlayak tentang bagaimana proses dari sebuah pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang menggunakan sumber dana atau anggaran, sehingga tidak menimbulkan opini

publik apabila terjadi penyelewengan atau penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukannya.

Selain itu transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Sedangkan akuntabilitas menurut Mardiasmo (2009:18), adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Akuntabilitas juga merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil serta cara-cara yang digunakan untuk mencapai semua itu. Pengendalian (*control*) sebagai bagian penting dalam manajemen yang baik adalah hal yang saling menunjang dengan akuntabilitas. Dengan kata lain pengendalian tidak dapat berjalan efisiensi dan efektif bila tidak ditunjang dengan mekanisme akuntabilitas yang baik dan juga sebaliknya.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntabilitas bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas dana

yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam peningkatan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Dari hasil penelitian juga di temukan bahwa variabel yang dominan pengaruhnya adalah variabel Akuntabilitas (X2) yakni sebesar 0,277 atau 27.7% dibandingkan dengan Variabel Transparansi (X1) yakni sebesar 0,216 atau 21.6%. Adapun terdapat beberapa indikator pada variabel transparansi yang tidak dilakukan oleh pemerintah desa teratai secara maksimal dan efektif yakni indikator Adanya pertanggungjawaban pengelolaan ADD, Adanya pembagian peran dan tanggungjawab yang jelas dari masing-masing tingkat pemerintahan terkait pengelolaan ADD, Adanya publikasi yang dilakukan pemerintah desa teratai berkaitan dengan hasil laporan anggaran (yang telah diaudit oleh lembaga yang berwenang) tentang pengelolaan alokasi dana desa, Adanya dokumentasi anggaran pemerintah desa teratai sebagai bukti transparansi anggaran alokasi dana desa, Adanya keterbukaan informasi berkaitan dengan pengelolaan alokasi dana desa di desa teratai, Adanya lembaga audit yang independen dan efektif dalam pengelolaan ADD di desa teratai, Adanya keterburkaan informasi kepada masyarakat selama proses penyusunan anggaran alokasi dana desa, Adanya kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses penganggaran Alokasi Dana Desa, semua indikator tersebut rata-rata masuk pada kategori sedang berdasarkan tafsiran Guilfort dalam skala penilaian tanggapan responden. Sedangkan indikator yang mendapatkan tanggapan kecil atau masuk pada kategori rendah adalah indikator Adanya data yang akurat dan terpercaya berkaitan dengan pengelolaan alokasi dana desa di desa teratai. Dimana dari pengamatan dan

temuan peneliti, tidak didapatkan data yang akurat yang berada di kantor desa teratai berkaitan dengan pengelolaan alokasi dana desa, karena menurut beberapa sumber yang mengetahui data tersebut hanyalah kepala desa dan bendahara, dan menurut informan bahwa data akurat pengelolaan alokasi dana desa di desa teratai tidak bisa menjadi konsumsi publik karena di khawatirkan dapat disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Sehingga secara umum hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa teratai kecamatan marisa sudah melakukan prinsip transparansi dan keterbukaan pada pengelolaan alokasi dana desa, namun maksimal dan belum efektif meskipun transparansi memberikan pengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Sedangkan dilihat dari variabel akuntabilitas dalam pengelolaan alokas dana desa di desa teratai kecamatan marisa, dapat dikatakan sudah berjalan maksimal dan efektif dimana pemerintah desa atau kepala desa sudah berusaha dan berupaya untuk selalu mempertanggung jawabkan pengelolaan alokasi dana desa tersebut kepada pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Pohuwato sesuai dengan aturan perundang-undangan, petunjuk teknis maupun petunjuk pelaksanaannya, dan proses akuntabilitas tersebut di laksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Hasil penelitian ini juga sejalan dan selaras dengan kajian teoritis mengenai transparansi dan akuntabilitas yang bersumber dari Andrianto (2007:21), maupun berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014.

BAB V

P E N U T U P

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan Transparansi (X1) secara parsial terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Teratai Kecamatan Marisa. Hal ini ditunjukkan oleh variabel Transparansi yang memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,216, dan nilai probabilitas sebesar 0,080 yang berarti Transparansi mempengaruhi Pengelolaan Alokasi Dana Desa secara signifikan sebesar 21.6%.
2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel Akuntabilitas (X2) secara parsial terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Teratai Kecamatan Marisa. Hal ini ditunjukkan oleh variabel Akuntabilitas yang memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,277, dan nilai probabilitas sebesar 0,011 yang berarti Akuntabilitas mempengaruhi Pengelolaan Alokasi Dana Desa secara signifikan yaitu sebesar 27.7%.
3. Terdapat pengaruh positif dan signifikan berupa variabel Transparansi dan Akuntabilitas terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Teratai Kecamatan Marisa secara simultan (bersama-sama), yang di dibuktikan bahwa nilai konstanta sebesar 12.419 menyatakan bahwa jika variabel Transparansi dan Akuntabilitas dianggap konstan, maka pengelolaan Alokasi Dana Desa sebesar 12.419. Sedangkan nilai koefisien regresi masing-masing

variabel bebas yang diteliti jika meningkat satu satuan, maka pengelolaan Alokasi Dana Desa akan meningkat sebesar nilai koefisien variabel-variabel bebas tersebut.

5.2. Saran-Saran

Beberapa saran yang dapat diajukan berkaitan dengan kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian di dapatkan bahwa prinsip transparansi belum di jalankan secara efektif dan maksimal sehingga hal ini menjadi perhatian pemerintah desa teratai kedepannya bahwa keterbukaan informasi pengelolaan alokasi dana desa merupakan kewajiban pemerintah desa dan masyarakat juga memiliki hak untuk mengetahuinya.
2. Hendaknya pemerintah desa melakukan keterbukaan informasi berupa publikasi penggunaan dana serta menyampaikan data akurat berkaitan dengan pengelolaan alokasi dana desa, sehingga tidak menimbulkan opini liar dari masyarakat.
3. Perlunya pelibatan masyarakat secara aktif dalam proses pengelolaan alokasi dana desa, sehingga peruntukannya benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, Nico. 2007. *Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Astuti, T.P., dan Yulianto. 2016. *Good Governance Penelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014*. Universitas Setia Budi Surakarta.
- Dewi, N.K.J.K., Atmadja, A.T., dan Herawati., N.T. 2015. Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan di Tingkat Dadia (Studi Kasus pada Dadia Punduh Sedahan di Desa Pakraman Bila Bajang). *Akuntansi, Universitas Pendidikan Ganesha. Jurnal. Vol.3. No.1. Ismail, I., Widagdo., A.K., dan Widodo, A. 2016. Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. Jurnal. Vol.12. No.2. Kumalasari, D., dan Riharjo, I.B. 2016 Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Jurnal. Vol.5*
- Mahmudi, 2010, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta. Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDY Yogyakarta.
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Sutopo, Ariesto Hadi,. Adrianus, Arief. 2010. *Terampil mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO*. Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GRUP.

- Taufik, Taufeni. 2014. Pengelolaan Keuangan Desa dalam Sistem Keuangan Negara Republik Indonesia. Akuntansi, Universitas Riau. Ulum, I. (2010). Akuntansi Sektor Publik. Malang: UMMPRESS
- Widjaja, HAW. 2005. Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA.



KUESIONER PENELITIAN

PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS TERHADAP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA TERATAI KECAMATAN MARISA KABUPATEN POHUWATO

Kuesioner ini digunakan dalam rangka penyusunan tugas akhir yakni SKRIPSI sebagai syarat utama dalam mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Politik pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo. Oleh karena itu di perlukan dukungan dan partisipasi dari Bapak/Ibu/Saudara/i untuk meluangkan waktu mengisi kuesioner ini. Mohon Bapak/Ibu/Saudara/i berkenan mengisi kuesioner ini dengan sejujurnya. Masukan dan informasi yang jujur, benar dan akurat sangat di harapkan agar informasi ilmiah yang disajikan benar-benar dapat di pertanggungjawabkan.

Terima kasih atas dukungan dan partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/i dalam pengisian kuesioner ini.

PETUNJUK PENGISIAN

- Berilah tanda ***Cheklis*** pada jawaban yang sesuai dengan pilihan anda.
- Di mohon semua pertanyaan atau pernyataan dapat diisi secara objektif dan tidak ada yang terlewat
- Jawaban kuesioner yang anda isi di jamin kerahasiaannya

Keterangan

- STS (Sangat Tidak Setuju) di beri skor : 1
- TS (Tidak Setuju) di beri skor : 2
- RR (Ragu-Ragu) di beri skor : 3
- S (Setuju) di beri skor : 4
- SS (Sangat Setuju) di beri skor : 5

Identitas Responden

Nama

:

Jenis Kelamin

:

Usia

:

Pendidikan Terakhir

:

I. VARIABEL TRANSPARANSI (X1)

NO	PERNYATAAN	ALTERNATIF JAWABAN				
		SS	S	RR	TS	STS
Kerangka Kerja Hukum Bagi Transparansi						
1	Adanya aturan perundang-undangan yang mengatur khusus persoalan transparansi pengelolaan ADD					
2	Adanya kerangka kerja hukum yang memberi defenisi yang jelas tentang peran dan tanggungjawab bagi semua aspek berkaitan dengan transparansi pengelolaan ADD					
3	Adanya pertanggungjawaban pengelolaan ADD					
4	Adanya pembagian peran dan tanggungjawab yang jelas dari masing-masing tingkat pemerintahan terkait pengelolaan ADD					
Akses Masyarakat Terhadap Transparansi Anggaran						
5	Adanya keterbukaan pengelolaan alokasi dana desa kepada masyarakat desa teratai dalam rangka kerja anggaran (proses penganggaran)					
6	Adanya publikasi yang dilakukan pemerintah desa teratai berkaitan dengan hasil laporan anggaran (yang telah diaudit oleh lembaga yang					

	berwenang) tentang pengelolaan alokasi dana desa					
7	Adanya dokumentasi anggaran pemerintah desa teratai sebagai bukti transparansi anggaran alokasi dana desa					
8	Adanya keterbukaan informasi berkaitan dengan pengelolaan alokasi dana desa di desa teratai					
Audit Independen Dan Efektif						
9	Adanya lembaga audit yang independen dan efektif dalam pengelolaan ADD di desa teratai					
10	Adanya data yang akurat dan terpercaya berkaitan dengan pengelolaan alokasi dana desa di desa teratai					
Keterlibatan Masyarakat Dalam Pembuatan Keputusan Anggaran						
11	Adanya keterbukaan informasi kepada masyarakat selama proses penyusunan anggaran alokasi dana desa					
12	Adanya kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses penganggaran Alokasi Dana Desa					

II. VARIABEL AKUNTABILITAS (X2)

NO	PERNYATAAN	ALTERNATIF JAWABAN				
		SS	S	RR	TS	STS
Tahap Perencanaan						
1	Penatausahaan alokasi dana desa di desa teratai dilakukan oleh Bendahara Desa					
2	Bendahara Desa teratai wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib berkaitan dengan ADD					
3	Bendahara Desa teratai wajib mempertanggung jawabkan Alokasi Dana Desa melalui laporan pertanggungjawaban					
4	Laporan Pertanggungjawaban ADD di desa teratai disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan					

	berikutnya					
Tahap Pelaporan						
5	Kepala Desa Teratai menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan pengelolaan ADD kepada Bupati berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun					
6	Laporan semester pertama berupa laporan realisasi pengelolaan ADD					
7	Laporan realisasi pelaksanaan ADD semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan					
Tahap Pertanggungjawaban						
8	Kepala Desa Teratai menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan pengelolaan ADD kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran					
9	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Pengelolaan ADD terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan					
10	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD ditetapkan dengan Peraturan Desa					

III. VARIABEL PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (Y)

NO	PERNYATAAN	ALTERNATIF JAWABAN				
		SS	S	RR	TS	STS
1	Alokasi dana desa di desa teratai di gunakan untuk peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar					
2	Alokasi dana desa di desa teratai di gunakan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia					
3	Alokasi dana desa di desa teratai di gunakan untuk pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif					
4	Alokasi dana desa di desa teratai di gunakan untuk pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi					

5	Alokasi dana desa di desa teratai di gunakan untuk peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa					
---	---	--	--	--	--	--

[illegible]

Correlations

		Item1	Item2	Item3	Item4	Item5	Item6	Item7	Item8
Item1	Pearson Correlation	1	.208	-.112	-.216	.243	.271	-.344 [*]	-.169
	Sig. (2-tailed)		.210	.505	.192	.142	.100	.035	.311
	N	38	38	38	38	38	38	38	38
Item2	Pearson Correlation	.208	1	.476 ^{**}	-.296	.432 ^{**}	.394 [*]	-.426 ^{**}	-.327 [*]
	Sig. (2-tailed)	.210		.003	.072	.007	.015	.008	.045
	N	38	38	38	38	38	38	38	38
Item3	Pearson Correlation	-.112	.476 ^{**}	1	.002	.162	-.062	-.132	.075
	Sig. (2-tailed)	.505	.003		.990	.332	.713	.429	.654
	N	38	38	38	38	38	38	38	38
Item4	Pearson Correlation	-.216	-.296	.002	1	.098	-.011	.181	.269
	Sig. (2-tailed)	.192	.072	.990		.558	.947	.277	.102
	N	38	38	38	38	38	38	38	38
Item5	Pearson Correlation	.243	.432 ^{**}	.162	.098	1	.512 ^{**}	-.556 ^{**}	-.107
	Sig. (2-tailed)	.142	.007	.332	.558		.001	.000	.522
	N	38	38	38	38	38	38	38	38
Item6	Pearson Correlation	.271	.394 [*]	-.062	-.011	.512 ^{**}	1	-.568 ^{**}	-.050
	Sig. (2-tailed)	.100	.015	.713	.947	.001		.000	.767
	N	38	38	38	38	38	38	38	38
Item7	Pearson Correlation	-.344 [*]	-.426 ^{**}	-.132	.181	-.556 ^{**}	-.568 ^{**}	1	-.229
	Sig. (2-tailed)	.035	.008	.429	.277	.000	.000		.166
	N	38	38	38	38	38	38	38	38
Item8	Pearson Correlation	-.169	-.327 [*]	.075	.269	-.107	-.050	-.260	1
	Sig. (2-tailed)	.311	.045	.654	.102	.522	.767	.114	
	N	38	38	38	38	38	38	38	38
Item9	Pearson Correlation	.135	.248	-.041	-.489 ^{**}	-.017	.159	-.229	-.327 [*]
	Sig. (2-tailed)	.418	.133	.806	.002	.920	.339	.166	.045
	N	38	38	38	38	38	38	38	38
Item10	Pearson Correlation	.092	-.024	.126	.053	-.044	-.314	.109	-.041
	Sig. (2-tailed)	.584	.888	.451	.753	.794	.055	.516	.606

	N	38	38	38	38	38	38	38	
Item11	Pearson Correlation	.243	.432**	.089	-.388*	.410*	.238	-.461**	-.2
	Sig. (2-tailed)	.142	.007	.593	.016	.011	.150	.004	.0
	N	38	38	38	38	38	38	38	
Item12	Pearson Correlation	-.040	.066	.131	.015	.122	-.056	-.224	.0
	Sig. (2-tailed)	.813	.695	.433	.929	.465	.741	.177	.8
	N	38	38	38	38	38	38	38	
Total	Pearson Correlation	.349*	.606**	.442**	.104	.719**	.491**	-.549**	-.0
	Sig. (2-tailed)	.032	.000	.005	.536	.000	.002	.000	.6
	N	38	38	38	38	38	38	38	

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

CORRELATIONS

```

/VARIABLES=Item1 Item2 Item3 Item4 Item5 Item6 Item7 Item8 Item9
Item10 Item11 Item12 Total
/PRINT=TWOTAIL NOSIG
/MISSING=PAIRWISE.

```

Correlations

[DataSet0]

RELIABILITY

```

/VARIABLES=Item1 Item2 Item3 Item4 Item5 Item6 Item7 Item8 Item9
Item10 Item11 Item12 Total
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA
/SUMMARY=TOTAL.

```

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary			
		N	%
Cases	Valid	38	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	38	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.580	13

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Item1	74.21	14.279	.229	.454
Item2	74.39	13.435	.524	.411
Item3	74.24	13.915	.330	.438
Item4	74.92	15.318	-.069	.512
Item5	75.82	11.776	.606	.346
Item6	75.82	13.289	.347	.422
Item7	75.63	19.320	-.666	.639
Item8	76.03	16.134	-.227	.533
Item9	75.95	14.862	.015	.495
Item10	76.39	15.489	-.080	.501
Item11	75.82	12.641	.421	.397
Item12	75.66	13.799	.256	.444
Total	39.34	3.853	1.000	-.250 ^a

a. The value is negative due to a negative average covariance among items. This violates reliability model assumptions. You may want to check item codings.

```
FREQUENCIES VARIABLES=Item1 Item2 Item3 Item4 Item5 Item6 Item7
Item8 Item9 Item10 Item11 Item12
Total
/ORDER=ANALYSIS.
```

Frequency Table

Item1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 4	20	52.6	52.6	52.6
5	18	47.4	47.4	100.0
Total	38	100.0	100.0	

Item2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 4	27	71.1	71.1	71.1
5	11	28.9	28.9	100.0
Total	38	100.0	100.0	

Item3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4	21	55.3	55.3	55.3
	5	17	44.7	44.7	100.0
	Total	38	100.0	100.0	

Item4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	14	36.8	36.8	36.8
	4	19	50.0	50.0	86.8
	5	5	13.2	13.2	100.0
	Total	38	100.0	100.0	

Item5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	13	34.2	34.2	34.2
	3	17	44.7	44.7	78.9
	4	8	21.1	21.1	100.0
	Total	38	100.0	100.0	

Item6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	11	28.9	28.9	28.9
	3	21	55.3	55.3	84.2
	4	6	15.8	15.8	100.0
	Total	38	100.0	100.0	

Item7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	10	26.3	26.3	26.3
	3	16	42.1	42.1	68.4

	4	12	31.6	31.6	100.0
	Total	38	100.0	100.0	

Item8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	15	39.5	39.5	39.5
	3	21	55.3	55.3	94.7
	4	2	5.3	5.3	100.0
	Total	38	100.0	100.0	

Item9

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	15	39.5	39.5	39.5
	3	18	47.4	47.4	86.8
	4	5	13.2	13.2	100.0
	Total	38	100.0	100.0	

Item10

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	27	71.1	71.1	71.1
	3	11	28.9	28.9	100.0
	Total	38	100.0	100.0	

Item11

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	13	34.2	34.2	34.2
	3	17	44.7	44.7	78.9
	4	8	21.1	21.1	100.0
	Total	38	100.0	100.0	

		Item12			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	7	18.4	18.4	18.4
	3	23	60.5	60.5	78.9
	4	8	21.1	21.1	100.0
	Total	38	100.0	100.0	

```

CORRELATIONS
  /VARIABLES=Item1 Item2 Item3 Item4 Item5 Item6 Item7 Item8 Item9
Item10 Total
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG
  /MISSING=PAIRWISE.

```

Correlations

[DataSet0]

		Correlations					
		Item1	Item2	Item3	Item4	Item5	Item6
Item1	Pearson Correlation	1	-.201	.143	-.031	.021	.3
	Sig. (2-tailed)		.226	.393	.855	.900	.0
	N	38	38	38	38	38	
Item2	Pearson Correlation	-.201	1	-.193	.311	-.070	.0
	Sig. (2-tailed)	.226		.246	.058	.676	.8

	N	38	38	38	38	38	
Item3	Pearson Correlation	.143	-.193	1	.184	.163	-.0
	Sig. (2-tailed)	.393	.246		.268	.327	.8
	N	38	38	38	38	38	
Item4	Pearson Correlation	-.031	.311	.184	1	-.105	.1
	Sig. (2-tailed)	.855	.058	.268		.530	.4
	N	38	38	38	38	38	
Item5	Pearson Correlation	.021	-.070	.163	-.105	1	.2
	Sig. (2-tailed)	.900	.676	.327	.530		.0
	N	38	38	38	38	38	
Item6	Pearson Correlation	.391*	.030	-.027	.115	.287	
	Sig. (2-tailed)	.015	.856	.873	.491	.080	
	N	38	38	38	38	38	
Item7	Pearson Correlation	-.080	-.005	-.182	.096	.143	.0
	Sig. (2-tailed)	.631	.977	.275	.565	.392	.9
	N	38	38	38	38	38	
Item8	Pearson Correlation	.251	.136	.178	-.184	-.034	-.1
	Sig. (2-tailed)	.128	.414	.284	.268	.841	.4
	N	38	38	38	38	38	
Item9	Pearson Correlation	.016	-.054	.091	-.020	.438**	.1
	Sig. (2-tailed)	.922	.746	.587	.907	.006	.3
	N	38	38	38	38	38	
Item10	Pearson Correlation	-.277	.006	-.024	.024	-.052	-.2
	Sig. (2-tailed)	.092	.969	.888	.885	.757	.0
	N	38	38	38	38	38	
Total	Pearson Correlation	.373*	.258	.472**	.366*	.482**	.4
	Sig. (2-tailed)	.021	.118	.003	.024	.002	.0
	N	38	38	38	38	38	

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

RELIABILITY

```

/VARIABLES=Item1 Item2 Item3 Item4 Item5 Item6 Item7 Item8 Item9
Item10 Total
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA
/SUMMARY=TOTAL.

```

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	38	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	38	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.582	11

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Item1	79.68	10.492	.244	.563
Item2	79.61	10.840	.115	.583
Item3	79.97	9.756	.294	.549
Item4	79.82	10.641	.259	.564
Item5	79.76	10.240	.375	.546
Item6	79.68	10.384	.281	.557
Item7	80.26	10.740	.091	.590
Item8	79.63	10.509	.158	.577
Item9	79.84	10.839	.199	.572
Item10	79.74	11.226	.011	.597
Total	42.00	2.865	1.000	.129

```
FREQUENCIES VARIABLES=Item1 Item2 Item3 Item4 Item5 Item6 Item7
Item8 Item9 Item10 Total
/ORDER=ANALYSIS.
```

Frequencies

Frequency Table

Item1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4	26	68.4	68.4	68.4
	5	12	31.6	31.6	100.0
	Total	38	100.0	100.0	

Item2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4	23	60.5	60.5	60.5
	5	15	39.5	39.5	100.0
	Total	38	100.0	100.0	

Item3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	8	21.1	21.1	21.1
	4	21	55.3	55.3	76.3
	5	9	23.7	23.7	100.0
	Total	38	100.0	100.0	

Item4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4	31	81.6	81.6	81.6
	5	7	18.4	18.4	100.0
	Total	38	100.0	100.0	

Item5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent

Valid	4	29	76.3	76.3	76.3
	5	9	23.7	23.7	100.0
Total		38	100.0	100.0	

Item6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4	26	68.4	68.4	68.4
	5	12	31.6	31.6	100.0
Total		38	100.0	100.0	

Item7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	13	34.2	34.2	34.2
	4	22	57.9	57.9	92.1
	5	3	7.9	7.9	100.0
Total		38	100.0	100.0	

Item8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	2	5.3	5.3	5.3
	4	20	52.6	52.6	57.9
	5	16	42.1	42.1	100.0
Total		38	100.0	100.0	

Item9

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4	32	84.2	84.2	84.2
	5	6	15.8	15.8	100.0
Total		38	100.0	100.0	

Item10

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4	28	73.7	73.7	73.7
	5	10	26.3	26.3	100.0
Total		38	100.0	100.0	

Total

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	38	1	2.6	2.6	2.6
	39	1	2.6	2.6	5.3
	40	4	10.5	10.5	15.8
	41	9	23.7	23.7	39.5
	42	9	23.7	23.7	63.2
	43	9	23.7	23.7	86.8
	44	1	2.6	2.6	89.5
	45	3	7.9	7.9	97.4
	46	1	2.6	2.6	100.0
Total		38	100.0	100.0	

Correlations

		Item1	Item2	Item3	Item4	Item5	Total	
Pearson Correlation	Item1	Pearson Correlation	1	.020	.200	.264	-.088	.581**
		Sig. (2-tailed)		.906	.230	.109	.601	.000
		N	38	38	38	38	38	38
		Sig. (2-tailed)	.906		.921	.906	.650	.006
		N	38	38	38	38	38	38
	Item3	Pearson Correlation	.200	.017	1	-.042	.152	.572**
		Sig. (2-tailed)	.230	.921		.803	.361	.000
		N	38	38	38	38	38	38
	Item4	Pearson Correlation	.264	-.020	-.042	1	-.257	.515
		Sig. (2-tailed)	.109	.906	.803		.120	.054
		N	38	38	38	38	38	38
	Item5	Pearson Correlation	-.088	.076	.152	-.257	1	.457**
		Sig. (2-tailed)	.601	.650	.361	.120		.004
		N	38	38	38	38	38	38

Total	Pearson Correlation	.581**	.437**	.572**	.315	.457**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.006	.000	.054	.004	
	N	38	38	38	38	38	38

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

```

CORRELATIONS
  /VARIABLES=Item1 Item2 Item3 Item4 Item5 Total
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG
  /MISSING=PAIRWISE.

```

Correlations

[DataSet0]

```

RELIABILITY
  /VARIABLES=Item1 Item2 Item3 Item4 Item5 Total
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL
  /MODEL=ALPHA
  /SUMMARY=TOTAL

```

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	38	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	38	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.634	6

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Item1	24.11	6.637	.405	.583
Item2	24.24	7.267	.259	.626
Item3	24.47	6.743	.405	.586
Item4	24.42	7.710	.146	.652
Item5	24.03	6.999	.231	.636
Total	13.47	2.094	1.000	.144

```
FREQUENCIES VARIABLES=Item1 Item2 Item3 Item4 Item5 Total
/ORDER=ANALYSIS.
```

Frequency Table

Item1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2	11	28.9	28.9	28.9
3	22	57.9	57.9	86.8
4	5	13.2	13.2	100.0
Total	38	100.0	100.0	

Item2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2	13	34.2	34.2	34.2
3	23	60.5	60.5	94.7
4	2	5.3	5.3	100.0

Total	38	100.0	100.0	
-------	----	-------	-------	--

Item3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	22	57.9	57.9	57.9
	3	14	36.8	36.8	94.7
	4	2	5.3	5.3	100.0
	Total	38	100.0	100.0	

Item4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	18	47.4	47.4	47.4
	3	20	52.6	52.6	100.0
	Total	38	100.0	100.0	

Item5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	11	28.9	28.9	28.9
	3	19	50.0	50.0	78.9
	4	8	21.1	21.1	100.0
	Total	38	100.0	100.0	

Total

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	11	2	5.3	5.3	5.3
	12	6	15.8	15.8	21.1
	13	13	34.2	34.2	55.3

14	11	28.9	28.9	84.2
15	4	10.5	10.5	94.7
16	1	2.6	2.6	97.4
19	1	2.6	2.6	100.0
Total	38	100.0	100.0	

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	95.0% Confidence Interval for B	
	B	Std. Error	Beta			Lower Bound	Upper Bound
1 (Constant)	12.419	6.812		4.823	.077	-1.410	26.648
Transparansi	.216	.120	.292	2.801	.080	-.027	.459
Akuntabilitas	.277	.139	.307	3.274	.011	-.045	.599

a. Dependent Variable: Alokasi Dana Desa

```

REGRESSION
  /DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N
  /MISSING LISTWISE
  /STATISTICS COEFF OUTS CI(95) R ANOVA CHANGE
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
  /NOORIGIN
  /DEPENDENT Y
  /METHOD=ENTER X1 X2.

```


Regression

[DataSet0]

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Alokasi Dana Desa	13.47	1.447	38
Transparansi	39.34	1.963	38
Akuntabilitas	42.00	1.693	38

Correlations

		Alokasi Dana Desa	Transparansi	Akuntabilitas
Pearson Correlation	Alokasi Dana Desa	1.000	.255	
	Transparansi	.255	1.000	
	Akuntabilitas	-.154	.179	
Sig. (1-tailed)	Alokasi Dana Desa	.	.061	
	Transparansi	.061	.	
	Akuntabilitas	.177	.141	
N	Alokasi Dana Desa	38	38	
	Transparansi	38	38	
	Akuntabilitas	38	38	

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Akuntabilitas, Transparansi ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Alokasi Dana Desa

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics			
					R Square Change	F Change	df1	
1	.527 ^a	.607	.056	1.406	.107	2.089	2	

a. Predictors: (Constant), Akuntabilitas, Transparansi

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	8.262	2	4.131	2.089	.039 ^b
	Residual	69.211	35	1.977		
	Total	77.474	37			

a. Dependent Variable: Alokasi Dana Desa

b. Predictors: (Constant), Akuntabilitas, Transparansi

Transparansi	.216	.120	.292	2.801	.080	-.027
Akuntabilitas	.277	.139	.307	3.274	.011	-.459

a. Dependent Variable: Alokasi Dana Desa

Coefficients ^a								
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	95.0% Confidence Interval for B	
		B	Std. Error	Beta			Lower Bound	Upper Bound
1	(Constant)	12.419	6.812		4.823	.077	-1.410	
	Transparansi	.216	.120	.292	2.801	.080	-.027	
	Akuntabilitas	.277	.139	.307	3.274	.011	-.459	

a. Dependent Variable: Alokasi Dana Desa



Nama Responden : Idran Suleman



Nama Responden : Imran Karama



Nama Responden : Ismet Hamzah



Nama Responden : Fitrawati Diange



Nama Responden : Ismet Hamzah



Nama Responden : Fitrawati Diange



PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO
KECAMATAN MARISA
DESA TERATAI

Alamat : Dusun Bihe Desa Teratai Kec. Marisa Kab. Pohuwato

Nomor : 184/DT-MRS/IX/2021

Lampiran : -

Hal : Surat Balasan

Kepada Yth
Ketua Jurusan S1 Ilmu Pemerintahan
Di-
Tempat

Denga Hormat

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SIMSON HASAN, SH

Jabatan : Kepala Desa Teratai

Alamat : Desa Teratai kec. Marisa kab. Pohuwato

Menerangkan bahwa,

Nama : GUSTIRANDA BANGGA

No. Mahasiswa : S2118115

Mahasiswa : S1 Ilmu Pemerintahan

Telah Kami setuju untuk melaksanakan penelitian pada Desa kami sebagai syarat penyusunan skripsi dengan judul :

“PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA TERATAI KECAMATAN MARISA KABUPATEN POHUWATO”

Demikian surat ini kami sampaikan , dan atas kerja samanya kami mengucapkan terima kasih.

Marisa, 24 September 2021
Kepala Desa Teratai

SIMSON HASAN, SH



SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

Nomor : 155/FISIP-UNISAN/S-BP/VI/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Darmawaty Abd. Razak, S.IP., M.AP
NIDN : 0924076701
Jabatan : Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : GUSTIRANDA BANGGA
NIM : S2118115
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Judul Skripsi : PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
PEMERINTAH DESA TERHADAP PENGELOLAAN
ALOKASI DANA DESA DI DESA TERATAI
KECAMATAN MARISA KABUPATEN POHUWATO

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar **6%**, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Dekan,

Gorontalo, 06 Juni 2022
Tim Verifikasi,

Dr. Arman, S.Sos., M.Si
NIDN. 0913078602

Darmawaty Abd. Razak, S.IP., M.AP
NIDN. 0924076701

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin

PAPER NAME

AUTHOR

**Skripsi_S2118115_Gu
stiranda Bangga_P
engaruh
Akuntabilitas dan
Transparansi
Pemerintah Desa
Terhadap**

**S2118115 GUSTIRANDA
BANGGA**

WOR
D
COU
NT

CHARACTER COUNT

96628 Characters

**155
59
Wor
ds**

PA
GE
CO
UN
T

FILE SIZE

288.3KB

**8
9
P
a
g
e
s**

SUBMISSION DATE

**Jun 12, 2022 9:05
PM GMT+8**



REPORT DATE

**Jun 12, 2022 9:08
PM GMT+8**

● **6% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 6% Internet database
- 1% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database 1%
- Submitted Works database

● **Excluded from Similarity Report**

- Bibliographic material (Less than 25 words)
- Small Matches

Summary

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS

Nama	: GustiRanda Bangga
Nim	: S.2118115
Tempat/tanggal lahir	: Marisa/ 23-06-1999
Angkatan	: 2017-2018
Jurusan	: Ilmu Pemerintahan
Program studi	: S1
Status	: Mahasiswa
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Alamat	: Desa Teratai Kec.Marisa Kab.Pohuwato



B. RIWAYAT PENDIDIKAN

Pendidikan formal

- SDN Teratai tahun 2011
- MTS AL-Khairat Buntulia 2014
- SMA Negeri 1 Marisa 2017
- Strata Satu (S-1) 2022